



VOLUME X | NO. 98 / NOVEMBER 2015

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

ISSN 1907-6320



PAKET SOLUSI PENGGERAK EKONOMI

Berbagai kebijakan ekonomi dirancang pemerintah di tengah kondisi global yang tak pasti. Agar pasar percaya diri dan investor tak pergi.





Presiden R.I bersama Menteri Keuangan, Kepala BKPM, dan Direktur Jenderal Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang hasil tegahan DJBC berupa tekstil ilegal yang dilansir merugikan negara senilai Rp2,3 miliar, di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jum'at (16/10).

Fotografer
Anas Nur Huda

Teks
Iin Kurniati

Daftar Isi



5 Dari Lapangan Banteng

6 Eksposur

10 Lintas Peristiwa

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. **Ketua Pengarah:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. **Redaktur Unit Eselon I:** Arief Rahman Hakim (DJBC), Pilar Wirotama (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), M. Hijrah (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Noer Anggraini (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF). **Redaktur Foto:** Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino Adi Prabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putu Chandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. **Tim Redaksi:** Hadi Siswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Ahmady Muhajiri, Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan, Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari, Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri, Abdul Aziz. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Reportase

25 Peningkatan Opini WTP Menuju Era Akrual

26 Pemusnahan Miras, Bahan Baku Miras, dan Rokok Ilegal

Wawancara

27 Cara Hatta Mencintai Indonesia

Potret Kantor

30 Tampil dengan PACAK

Figur

32 Kuncinya Komunikasi

Ekonomi Terkini

32 Jangan Biarkan Asap Terus Menyergap

Kolom Ekonom

40 APBN 2016 dan Pemberdayaan Daerah

Generasi Emas

44 Rorie dan Bidang

Komunikasi yang Dicintainya

Opini

46 Pajak E-Commerce Dalam Negeri, Sudah Berjalankah?

Regulasi

48 Portal INSW Percepat Bongkar Muat

Laporan Utama

13 Motor Ekonomi Adalah Kita

16 Infografis

18 Saatnya Berubah

21 Resep Gobel

Melewati Masa Krisis

23 Sudah Bukan

Saatnya Foya-Foya

Inspirasi

50 Suara Bariton Sulthon yang Memukau

Renungan

52 Saatnya Mulai

Membaca dan Menulis

Buku

53 Uji Nyali di Ketinggian

Jalan-jalan

54 Curug Seribu,

Pesona Air Jatuh di Lembah yang Teduh

Selebriti

56 Tak Sekedar Hit and Run

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



Ilustrasi
M. Fithrah - @fith101

STAN resmi berubah menjadi

Politeknik Keuangan Negara STAN

Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PKN STAN. PKN STAN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pembinaan PKN STAN secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. PKN STAN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan terapan di bidang Keuangan Negara

Bukan Sekedar Paket

Akhir-akhir pemberitaan di media menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Banyak yang mengulas mengenai perekonomian Indonesia yang lesu. Hal ini tentu mencemaskan masyarakat, investor, maupun dunia usaha. Atas dasar pemikiran inilah kemudian Pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijakan. Hingga saat ini sudah lima paket kebijakan diluncurkan. Tentu ini merupakan bukti pemerintah bekerja keras untuk menggerakkan roda ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berupaya menjalankan dua kerangka besar kebijakan. Pertama, dengan menjalankan reformasi anggaran pada tiga bidang, yaitu bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kedua, dengan cara pemberian stimulus fiskal melalui tiga komponen, yaitu penyerapan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran, peningkatan daya beli masyarakat, dan insentif untuk dunia usaha.

Reformasi anggaran di bidang pendapatan, dilakukan dengan mengubah penerimaan dari sumber daya alam menjadi penerimaan berbasis kegiatan ekonomi, misalnya melalui PPN, PPh, dan lain-lain. Kedua, untuk reformasi di bidang belanja dilakukan dengan mengubah pengeluaran regresif menjadi pengeluaran yang mempunyai multiplier effect lebih besar. Misalnya, memindahkan subsidi BBM menjadi anggaran infrastruktur. Jika infrastruktur dibangun, pelabuhan dibangun, jalan raya dibangun, jalan-jalan ke desa dibangun, maka akan

dinikmati oleh semua kalangan bukan hanya dinikmati oleh pengendara bermotor. Ketiga, melakukan reformasi pembiayaan dengan mengubah skema pembiayaan dari pasar melalui penjualan obligasi dengan pembiayaan dalam skema bilateral dan multilateral.

Dengan usaha-usaha pemerintah yang sedang dilakukan saat ini, semua kalangan harus yakin dan optimis terhadap naiknya pertumbuhan ekonomi. Negara ini mempunyai perekonomian yang solid dan memiliki fundamental yang cukup untuk membangun confidence. Arah dari kebijakan saat ini sudah berbeda dengan 3-5 tahun yang lalu, dan akan menjadi fundamental yang berbeda pula dibandingkan dengan sebelumnya. Kuncinya, semua kalangan harus kerja keras bersama-sama.

tweet

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Menurut Anda, apa dampak langsung yang Anda rasakan dari paket kebijakan ini? #OpiniAnda

Pradany Hayyu @hayheyho

@KemenkeuRI Belum merasakan langsung. Semoga dengan kebijakan deregulasi bisa mengurangi overlapping peraturan yang selama ini terjadi

Suhatarina HN @suhatarina

Paket kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendorong minat rakyat kepada perbankan syariah #OpiniAnda

Iin Kurniati @dorainka

Dampaknya belum terasa langsung tapi ke depan Semoga industri nasional makin kompetitif dan UKM makin maju #OpiniAnda

ithaaa @deeminded

blm ada dampak langsung ya.. tp semoga daya beli masyarakat meningkat shg roda ekonomi dpt berputar #OpiniAnda





Agar Rugi Cukai Tak Terjadi

Foto
Dok. DJBC

P etugas dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kudus sedang melakukan pengawasan dan pelayanan proses produksi pembuatan rokok. Tugas ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut besaran cukai dan peruntukan pita cukainya. Jika peruntukannya tidak sesuai, kerugian negara bisa terjadi.







Suatu Pagi di Kabupaten Pati

Foto
Ginjar Rah
Widodo

Waduk Seloromo yang terletak di Gembong, Kabupaten Pati memiliki dua fungsi. Di samping sebagai tujuan wisata, waduk ini juga menjadi sumber bagi air ribuan hektar sawah di sekitarnya. Saat musim kemarau, air waduk yang menyusut menimbulkan lahan kering. Warga sekitar memanfaatkan lahan ini untuk bertani dan bertambak.



06/10 Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD)

Teks
DJPK

Foto
DJPK

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Program Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2015. Penandatanganan secara simbolis dilakukan antara Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dan Kepala Daerah Penerima Hibah. Bupati Kepulauan Yapen, Bupati Alor, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Minahasa Selatan, Walikota Manado, dan Bupati Aceh Tengah hadir sebagai perwakilan Kepala Daerah Penerima Hibah, pada Jumat (06/10) di Hotel Lumire, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 120 Kepala Daerah atau Pejabat yang mewakili serta disaksikan oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Para Deputi serta pejabat BNPB lainnya.



13/10

Teks
DJP

Foto
DJP

Tax Drive Thru untuk Madura

KPP Pratama Bangkalan adalah salah satu kantor pelayanan publik yang terkenal akan kenyamanannya di Bangkalan. Beberapa kantor lain di Bangkalan bahkan sempat menjadikan KPP Pratama Bangkalan sebagai contoh. Kali ini KPP Pratama Bangkalan meresmikan layanan terbarunya yaitu *Drive Thru*. Letak KPP Pratama Bangkalan yang strategis yaitu berada persis di depan GOR menjadikan layanan *Drive Thru* salah satu layanan yang menarik bagi para wajib pajak. Wajib Pajak tidak perlu lagi berlama-lama antri di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

09/10

Teks
DJBC

Foto
DJBC

Bea Cukai Belawan Gagal Penyelundupan Teripang

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Belawan menggagalkan upaya penyelundupan produk ikan jenis teripang dan perut ikan tujuan Hongkong, serta satwa yang dilindungi berupa cangkang siput hijau atau *turbo marmoratus* tujuan Thailand. Kepala KPPBC TMP Belawan, Lupi Hartono mengungkapkan bahwa penegahan ekspor ilegal tersebut dilakukan Bea Cukai Belawan, pada Jumat (9/10) saat barang yang dikemas dalam dua kontainer itu berada di lapangan penumpukan Dermaga Belawan International Container Terminal (BICT) PT Pelindo Belawan.





15/10 | Teks BPPK
Foto BPPK

Wisuda Pertama Lulusan PKN STAN

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priyadi Pramudito bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (01/09). Gerai ini merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gerai layanan ini akan beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 10.00 – 15.00 WIB. Layanan yang diberikan kepada wajib pajak berupa pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelayanan, dan konsultasi pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di wilayah Tanah Abang.



16/10 | Teks DJBC
Foto Biro KLI

Penggagalan Penyelundupan 3.519 Rol Tekstil

Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menggagalkan upaya peredaran tekstil ilegal dalam press conference terkait penggagalan modus impor tekstil ilegal pada kawasan berikat oleh DJBC yang digelar pada Jumat (16/10) di Kantor Pusat DJBC. Total sejumlah 3.519 rol atau setara dengan 376.000 yard tekstil ilegal senilai sekitar Rp14 miliar berhasil digagalkan penyelundupannya. Penggagalan modus impor tekstil ilegal oleh DJBC ini merupakan bukti tindak lanjut atas arahan Presiden kepada kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam upaya pemberantasan barang impor ilegal, serta merupakan upaya untuk mendorong investasi industri dalam negeri.

2/11 BMN Award tema Repleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara

2-5/11 Rapat Kerja Nasional DJKN dibuka oleh Menteri Keuangan, di Mezanine BMN Award, di Dhanapala

3/11 Keynote speech CFO BUMN Forum di Citibank Jakarta

5/11 Badan Koordinasi Humas, di Kantor Pusat DJBC

9/11 Launching Politeknik Keuangan Negara (PKN), di STAN

11-12/11 Seminar Internasional Kementerian Keuangan & ADBI di Mezanine, Gedung Djuanda I

11/11 Seminar Internasional "Implementation of SPAN/ PFM/IFMIS in Indonesia, Lessons Learned and How to sustain and Improve" di Hotel Borobudur

12/11 Kepala BKF keynote speech mewakili Menteri Keuangan dalam Seminar IEO 2016 di Auditorium soeria atmadja Universitas Indonesia

24/11 Kepala BKF memberikan keynote speech dalam Asean Insight centre di, Ritz Carlton Pacific Plaza

30/11 Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016, di Istana Negara



07/10

Teks
BPPK

Foto
BPPK

Kunjungan Perwakilan British Embassy dan Chevening Secretariat

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Sumiyati menerima kunjungan perwakilan dari British Embassy Rowena Rompas dan Chevening Secretariat. Kunjungan tersebut diwakili oleh Julia Phelps (International Liaison Manager) dan Jonathan Greenhow (International Liaison Officer), dalam rangka kerjasama pengembangan SDM Kementerian Keuangan dalam bentuk tawaran beasiswa. Pertemuan ini berlangsung di Executive Room, Gedung B BPPK Purnawarman, Jakarta pada Rabu (07/10).



16/10 Konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2015

Teks
BPPK

Foto
BPPK

Kementerian Keuangan dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyelenggarakan Konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2015 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (22/10). Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan salah satu tujuan konferensi ini adalah para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat mendukung untuk mengawal nawacita yang sedang dijalankan pemerintahan saat ini. APIP juga diharapkan dapat mendorong penguatan pengawasan internal pemerintah, baik di Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah.



Peduli Bencana Kekeringan, Pegawai DJP Iuran Air Bersih

Dalam rangka peduli dengan kesulitan masyarakat, khususnya warga Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang dilanda kekurangan air bersih, pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II Surakarta dan KPP Pratama Sukoharjo memberi bantuan penyediaan air yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Surakarta, Yoyok Satiotomo. Menurut Yoyok, bantuan air ini merupakan hasil dari iuran pegawai di KPP Pratama Sukoharjo dan Kanwil DJP Jawa Tengah II yang jumlah totalnya sebanyak 90 tangki. Harapannya, bantuan ini dapat mengurangi beban penderitaan warga.

17/09

Daerah

Teks
DJP

Foto
DJP

MOTOR EKONOMI ADALAH KITA

Pengusaha nasional, Rahmat Gobel, dengan antusias menunjukkan sebuah radio dengan desain vintage ketika Media Keuangan menemuinya di Jakarta, Kamis (22/10). Perangkat elektronik bermerek Cawang Art Radio itu asli buatan anak negeri. Pada masa perlambatan ekonomi seperti sekarang, Rahmat mendorong pemerintah untuk berkomitmen lebih membangun industri tanah air.

Mantan Menteri Perdagangan itu berpendapat bahwa langkah pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi sudah *on the track*. “Pemerintah mau mendengar dan melihat kenyataan permasalahan di lapangan dan berusaha mencari solusi,” kata Rahmat. Dia berharap paket-paket kebijakan ekonomi terus dilanjutkan. Yang juga penting adalah perlunya memantau implementasi dan evaluasi terhadap paket-paket yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Sampai berita ini diturunkan, pemerintah telah mengeluarkan lima paket kebijakan ekonomi. Paket terakhir yang diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, berisi dua regulasi. Pertama, insentif pajak dalam revaluasi aset perusahaan, baik untuk BUMN maupun swasta. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada peluncuran paket kebijakan jilid V, Kamis (22/10), menjelaskan bahwa selama ini perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal bila hal ini dilakukan, utamanya untuk aset properti, bisa membuat nilai aset perusahaan meningkat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa revaluasi aset bisa juga dilakukan untuk aset properti. Menkeu mencontohkan revaluasi aset gudang Bulog di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. “Kalau pakai harga

saat ini, maka sudah beratus kali lipat dibandingkan tahun 1970. Jika ini dilakukan, maka nilai akan meningkat,” ujar Menkeu. Tarif pajak penghasilan (PPh) dalam revaluasi aset yang normalnya sebesar sepuluh persen diberikan insentif potongan menjadi tiga persen (hingga 31 Desember 2015), empat persen (1 Januari hingga 30 Juni 2016), dan enam persen (1 Juli hingga 31 Desember 2016).

Terkait poin kedua pada paket kebijakan kelima, pemerintah akan melakukan penghapusan pajak berganda untuk kontrak kolektif dana investasi *real estate* (DIRE) atau yang biasa disebut REITs (*Real Estate Investment Trust*). Ini merupakan surat berharga yang biasa diterbitkan perusahaan dengan jaminan atau *underlying asset* berupa properti atau infrastruktur. Pengenaan pajak berganda telah menyebabkan banyak perusahaan properti dan infrastruktur Indonesia menerbitkan REITs di Singapura. “Dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang akan dikeluarkan, pajak berganda ini dihilangkan, cukup *single tax*,” ujar Menkeu.

Paket-paket sebelumnya

Di tengah kelesuan ekonomi global, pemerintah ingin memberikan sinyal bahwa aktivitas perekonomian dalam negeri akan menjadi motor pertumbuhan. Hal ini juga tercermin dalam empat paket kebijakan sebelumnya. Pada paket kebijakan jilid I yang diluncurkan awal September,



Sekretaris Kabinet Pramono Anung didampingi sejumlah pejabat pemerintah, termasuk di antaranya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengumumkan paket kebijakan jilid V, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

Foto
www.setkab.go.id

pemerintah antara lain menunjukkan komitmen untuk memperkuat industri nasional, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta memperlancar perdagangan antardaerah.

Kemudian pada akhir September, lewat paket kebijakan jilid II, pemerintah berfokus pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk upaya ini berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Paket kebijakan ekonomi jilid III yang diluncurkan awal Oktober memberikan kemudahan dan kejelasan para pelaku usaha untuk menekan biaya.

Sementara melalui paket kebijakan keempat, yang dikeluarkan pertengahan Oktober, pemerintah mengeluarkan regulasi yang memperbaiki sistem pengupahan. Menurut Rahmat, adanya aturan pengupahan yang baru ini merupakan unsur penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. "Negara harus selalu hadir meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan aturan yang kondusif," kata Rahmat.

Reformasi anggaran dan stimulus fiskal

Ibarat naik pesawat terbang, ekonomi Indonesia beberapa tahun lalu diuntungkan dengan adanya angin belakang (*tailwind*). Pesawat melaju lebih cepat karena didorong angin. Angin itu, sekitar empat sampai lima tahun lalu, adalah harga komoditas yang tinggi di pasar global. Komoditas alam merupakan andalan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sekarang, ketika harga komoditas itu lagi rendah, kita seperti kena *headwind*, anginnya dari depan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazarra dalam wawancara dengan Media Keuangan, Rabu (21/10).

Dengan ilustrasi *headwind* tadi, perekonomian tetap tumbuh, hanya lebih pelan. "Biasanya kita tumbuh bisa sampai enam persen, sekarang hanya 4,7 persen," kata Suahasil. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berupaya menjalankan dua kerangka besar kebijakan.

Kerangka besar pertama adalah dengan menjalankan reformasi anggaran di tiga bidang, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Reformasi pendapatan akan dicapai dengan cara mengubah target penerimaan, dari yang

"Yang menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian itu bukan pemerintah. Dalam Produk Domestik Bruto, kontribusi pemerintah paling hanya 15-20 persen, sedangkan 80 persennya diciptakan dunia usaha."

Suahasil

sebelumnya mengandalkan penjualan sumber daya alam menjadi penerimaan dari hasil kegiatan ekonomi. Selanjutnya, reformasi pengeluaran dilakukan dengan membuat arah belanja yang difokuskan pada jenis yang menghasilkan efek pengganda lebih besar. Di situ kemudian terjadi perpindahan anggaran subsidi BBM ke sektor pembangunan, yaitu menjadi anggaran untuk infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial. Yang ketiga, pemerintah juga melakukan reformasi pembiayaan dengan membuat formula skema pembiayaan yang lebih seimbang antara pembiayaan dari pasar melalui penjualan obligasi dengan pembiayaan dalam skema bilateral dan multilateral.

Lebih jauh, pemberian stimulus fiskal yang menjadi kerangka besar kedua dilakukan melalui percepatan penyerapan anggaran, peningkatan daya beli, dan pemberian insentif kepada dunia usaha. Menurut Suahasil, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan mengacu pada dua kerangka besar ini. Pemerintah mengharapkan serangkaian regulasi yang diluncurkan bisa memberikan kepercayaan diri kepada investor, pelaku usaha, dan masyarakat. "Kita semua bekerja untuk membuat perekonomian bergerak lebih cepat," ujarnya.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya, reformasi anggaran menjadi fokus utama. "Ketika kita bicara dengan DPR tentang RAPBN 2016, tiga prinsip reformasi anggaran itu kita pegang," kata Suahasil. Pemerintah menjalankan peran mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan daya beli dan mendorong insentif untuk dunia usaha. Pada saat yang sama, pemerintah berharap di lapangan ekonomi bisa berjalan. "Yang menciptakan kesejahteraan dalam perekonomian itu bukan pemerintah. Dalam Produk Domestik Bruto, kontribusi pemerintah paling hanya 15-20 persen, sedangkan 80 persennya diciptakan dunia usaha," kata Suahasil.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri supaya memproduksi barang, menyerap tenaga kerja, sehingga kemudian membayar pajak. Saat industri tumbuh besar, tenaga kerja yang terserap lebih besar, produksi makin banyak, dan pajak yang diterima negara juga meningkat. "Paket-paket ini mengarah pada upaya untuk memfasilitasi tumbuhnya industri," kata Suahasil.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, menegaskan bahwa yang terpenting dalam situasi ekonomi saat ini adalah mengeluarkan kebijakan deregulasi berbagai peraturan. Selain *overlapping*, banyak

peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. "Melakukan deregulasi itu tidak pakai duit. Hanya butuh sedikit tekad karena mesti menghadapi perubahan undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya," kata Sofyan.

Dalam situasi yang kurang baik, lanjut Sofyan, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci. Tumpang tindih peraturan di level kementerian menjadi bukti miskordinasi. Sementara di tingkat pemerintah daerah, ribuan peraturan daerah membuat roda ekonomi kurang produktif dan berbiaya tinggi. "Kita harus menerima kenyataan dan mengubah *mindset*. Dalam situasi sulit, kita harus bersatu," lanjutnya.

Harapan

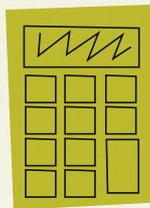
Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk menggerakkan ekonomi. Dari berbagai paket yang sudah dikeluarkan, pemerintah kini ingin melihat implementasi dari insentif untuk devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia, kata Suahasil, harus dicatat di perbankan Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, pada prakteknya, yang biasa terjadi adalah dana tersebut langsung keluar lagi setelah tercatat. Pemerintah lalu membuat insentif yang mengatur jika devisa itu tetap berada di Indonesia atau dikonversikan ke dalam rupiah, maka akan bebas dari pajak bunga deposito. Implementasi dari regulasi ini menjadi salah satu yang akan dievaluasi pemerintah.

Dengan terus menerbitkan berbagai paket kebijakan, Sofyan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa naik. "Namun, kita harus kerja keras bersama-sama, tidak bisa saling menyalahkan," katanya. Catatan untuk pemerintah juga disampaikan Rahmat. Dalam proses penyusunan paket regulasi yang akan datang, menjadi penting untuk memperbaiki daya saing Indonesia. Rahmat menyoroti peringkat daya saing ekonomi Indonesia versi World Economic Forum (WEF) yang turun pada tahun ini, yaitu dari urutan 34 pada tahun lalu menjadi 37 dari 140 negara. Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dirilis WEF, daya saing Indonesia masih kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand di urutan 32. Indonesia unggul dari Filipina (47), Vietnam (56), Laos (83), Kamboja (90), dan Myanmar (131).

Teks Dwinanda Ardhi

PAKET STIMULUS EKONOMI

Pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan diri kepada investor, pelaku usaha, dan masyarakat. Diharapkan semua lini bias bekerja sama untuk membuat perekonomian lebih cepat. dua kerangka besar kebijakan untuk meningkatkan Ekonomi adalah Reformasi Anggaran dan pemberian stimulus fiskal

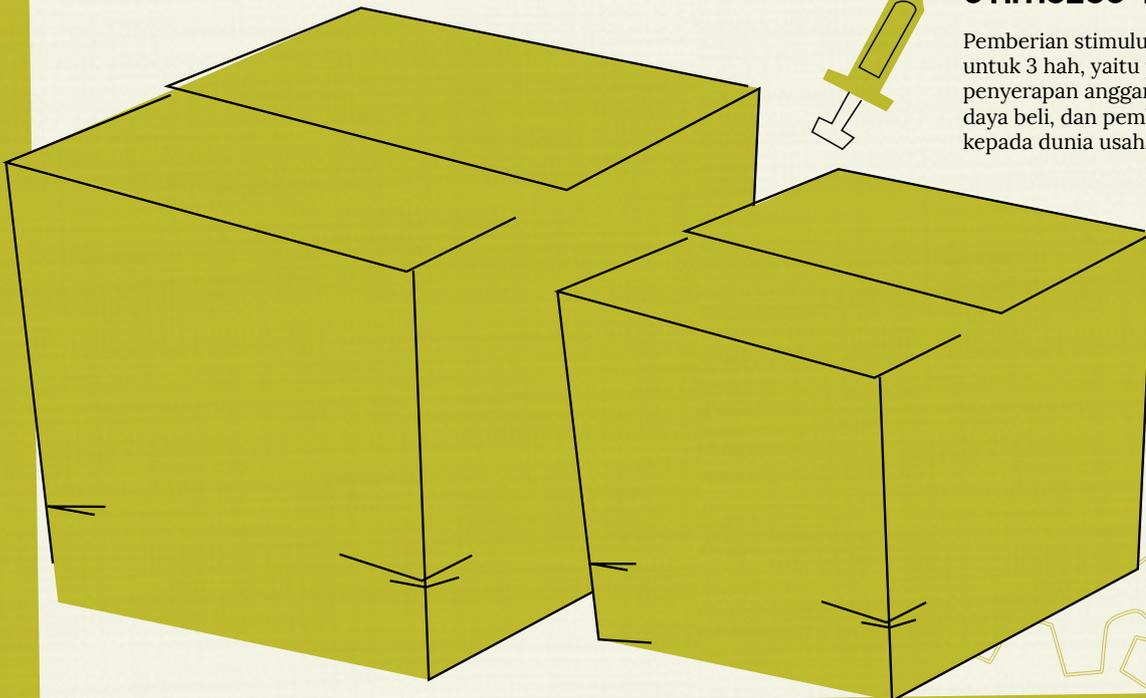
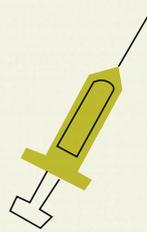


REFORMASI ANGGARAN

1. Mengubah target penerimaan, dari yang sebelumnya mengandalkan penjualan sumber daya alam menjadi penerimaan dari hasil kegiatan ekonomi
2. Membuat arah belanja yang difokuskan pada jenis yang menghasilkan efek pengganda lebih besar. Terjadi perpindahan anggaran subsidi BBM ke sektor pembangunan, yaitu menjadi anggaran untuk infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial
3. Membuat formula skema pembiayaan yang lebih seimbang antara pembiayaan dari pasar melalui penjualan obligasi dengan pembiayaan dalam skema bilateral dan multilateral.

STIMULUS FISKAL

Pemberian stimulus fiskal ditujukan untuk 3 hal, yaitu percepatan penyerapan anggaran, peningkatan daya beli, dan pemberian insentif kepada dunia usaha.





PAKET I

1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha
2. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional
3. Meningkatkan investasi di sektor properti

PAKET II

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam
2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat
3. Pemerintah Tidak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito
6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

PAKET III

1. Penurunan harga BBM, listrik dan gas
2. Perluasan penerima KUR
3. Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

PAKET IV

1. Kebijakan pengupahan yang adil, sederhana dan terproyeksi
2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas

PAKET V

1. Insentif pajak dalam revaluasi asset perusahaan
2. Penghapusan pajak berganda untuk dana investasi Real Estate, Properti dan Infrastruktur
3. Deregulasi di bidang perbankan syariah

SAATNYA BERUBAH



Kondisi perekonomian Indonesia ibarat pesawat yang terkena terpaan angin kencang dari arah depan. Seolah-olah pesawat itu sedang melawan terpaan angin hingga pergerakannya cenderung melambat. Inilah saatnya berubah ke arah yang lebih baik.

Pencairan dana desa yang baik diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur desa dan menggerakkan usaha ekonomi desa.

Foto
Sularno

Perekonomian dunia mengalami pertumbuhan yang tidak berimbang. Di satu sisi, kondisi ekonomi Amerika dan zona Eropa membaik. Di sisi lain, mitra utama Indonesia seperti Tiongkok, Jepang, dan negara-negara penghasil sumber daya alam justru menurun. Ketidakstabilan ekonomi makro ini diperburuk lagi dengan ketidakpastian kebijakan suku bunga The Fed dan devaluasi mata uang Tiongkok.

Konsekuensinya terjadi penurunan harga komoditas global yang tentu berdampak negatif bagi perekonomian domestik. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 4,7 persen pada kuartal kedua 2015 atau sama dengan kuartal sebelumnya. Fase ini memang masih jauh di bawah besaran krisis di tahun 1998 maupun 2008 silam namun pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan terburuk.

Oleh karena itu, sejak akhir September 2015 lalu, pemerintah mengemas sejumlah paket kebijakan ekonomi guna menstabilkan perekonomian tanah air. Seluruh kebijakan ekonomi tersebut lebih fokus pada pengembangan sektor industri dan investasi dengan tindakan nyata dari berbagai Kementerian/Lembaga pemerintah, salah satunya Kementerian Keuangan.

Selama ini, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, penerimaan Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA). "(Sebaiknya) Jangan terus-menerus bergantung dari sumber daya alam. Kita ubah basis penerimaan negara. Idealnya berasal dari kegiatan ekonomi," katanya.

Untuk itulah, lanjut Suahasil, saat ini pemerintah khususnya Kementerian Keuangan tengah melakukan perubahan mendasar dengan melakukan reformasi *budget* dan memberikan stimulus fiskal. Dalam reformasi budget, Kementerian Keuangan berupaya mengubah *mindset* pada sistem penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan supaya dapat mereduksi kerentanan ekonomi.

Pertama, pemerintah mengubah logika penerimaan negara yang semula berbasis sumber daya alam menjadi berbasis kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah terus mendorong kegiatan ekonomi dengan membuatnya bergulir lebih banyak, dan lebih cepat. Setelah itu, barulah dikenakan pajak, baik PPN, PPh maupun jenis

pajak lainnya.

Kedua, pengeluaran negara yang sifatnya regresif (tidak terarah) diubah menjadi pengeluaran dengan memiliki *multiplier effect* yang lebih besar. Salah satunya ialah penghapusan subsidi BBM yang dialihkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial.

Ketiga, sektor pembiayaan yang terlalu bergantung pada *market* (pasar) dengan menjual obligasi atau surat utang yang berisiko kecil tetapi bunganya tinggi. Padahal bila ditilik lebih dalam, pembiayaan melalui utang bilateral (antara negara) maupun multilateral (lembaga pembiayaan internasional) memiliki bunga lebih kecil meski risikonya tinggi.

"Sekarang kita mesti ramu jenis utang di pasar dengan utang bilateral, maupun multilateral. Selama tidak mengikat dengan *term* tertentu dan bunganya bagus (rendah), itu akan menurunkan *cost of fund* dari pembiayaan kita," ujar Suahasil.

Selain reformasi *budget*, Kementerian Keuangan juga memberikan stimulus fiskal untuk menggenjot perekonomian. Setidaknya, ada tiga komponen utama pemberian stimulus fiskal, yakni penyerapan anggaran yang lebih cepat, dan tepat sasaran, peningkatan daya beli masyarakat, serta insentif untuk kalangan dunia usaha.

Penyerapan anggaran, kerap dinyatakan Suahasil, dapat dilakukan dengan fokus pada menjalankan amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik. "Sudah ada APBN, bangun saja (infrastruktur) tepat waktu. Sudah akan jadi stimulus karena langsung memutar uang, roda perekonomian," ungkapnya.

Terkait peningkatan daya beli masyarakat, pemerintah telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48 persen (setara dengan Rp11,7 juta menjadi Rp36 juta setahun, dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta). Tujuannya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya mampu mendongrak perekonomian.

Kemudian, terkait pemberian insentif untuk kalangan usaha, hal ini sejalan dengan tujuan dari paket kebijakan ekonomi yang dikemas pemerintah baru-baru ini. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid dua, pemerintah fokus pada upaya simplifikasi perizinan investasi dan menjaga devisa hasil ekspor.

Pemerintah memberikan insentif pajak berupa *tax holiday* dan *tax allowance*. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKM) mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 18/2015 dan Nomor 19/2015. Kedua aturan tersebut berisi pengurangan waktu pengurusan *tax allowance* sebelumnya 28 hari kerja menjadi maksimal 25 hari kerja. Sementara pengurusan *tax holiday* mengalami pengurangan waktu dari semula 125 hari kerja menjadi 45 hari kerja.

Kementerian Keuangan juga tak lagi memungut PPN untuk sejumlah alat transportasi, seperti galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.

Peraturan Pemerintah Nomor 69/2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat. Dengan demikian, perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat. Rencananya hingga menjelang akhir tahun akan ada dua pusat logistik berikat yang siap beroperasi, yakni di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM.

Selain itu, Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/2015 itu menyebutkan pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap mesin, barang dan bahan yang berasal dari kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, kawasan ekonomi khusus, atau tempat penimbunan berikat.

Peran besar

Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR RI mengatakan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran yang besar pada pelaksanaan paket kebijakan ekonomi (terutama) dalam

penetapan peraturan maupun deregulasi, utamanya terkait penimbunan berikat.

"Kementerian Keuangan harus mengawal atau setidaknya memantau pelaksanaan revisi atas 44 aturan terkait *dwelling time* yang terdiri atas 30 aturan di Kementerian Perdagangan, 12 aturan di Kementerian Perindustrian, dan 2 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar Taufik

Peran besar Kementerian Keuangan juga dilihat dari *Indonesia National Single Window (INSW)* yang dapat memberi kemudahan kepada para importer serta mempercepat kegiatan ekspor dan impor. Targetnya, 30 September 2015 para importir sudah bisa mengajukan satu kali aplikasi (*single submission*) untuk mendapatkan perizinan dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses *dwelling time*.

Anggito Abimanyu, Kepala Ekonom Bank Rakyat Indonesia memandang tantangan terberat bagi Kemenkeu dalam pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ialah konsekuensi jangka pendek. "Konsekuensinya berupa penurunan pendapatan perpajakan, dan potensi kenaikan defisit yang dibiayai dari pinjaman atau obligasi global."

Pelaksanaan paket ini, lanjut Anggito, akan tergantung pada penyelesaian regulasi yang menjadi dasar dan respon birokrasi yang mempersiapkannya. Ekspektasi pasar dan pelaku ekonomi sangat tinggi pada ketepatan waktu berbagai kebijakan sehingga bila tidak sesuai dengan harapan, kredibilitas pemerintah akan dipertaruhkan.

"Kementerian Keuangan harus mengawal atau setidaknya memantau pelaksanaan revisi atas 44 aturan terkait *dwelling time* yang terdiri atas 30 aturan di Kementerian Perdagangan, 12 aturan di Kementerian Perindustrian, dan 2 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)."

Taufik Kurniawan

Kontribusi dana desa

Salah satu target dalam paket kebijakan ekonomi ketiga ialah menjaga daya beli masyarakat. Salah satu peran Kemenkeu ialah mengelola dana desa. Pencairan dana desa yang baik diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur desa dan menggerakkan usaha ekonomi desa.

Hingga semester pertama 2015, Dana Desa telah terealisasi Rp16,61 triliun, atau 80 persen dari pagu dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp20,77 triliun. Dari angka tersebut, berdasarkan keterangan resmi yang dilansir Bakohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (20/10), penyalurannya ke pemerintah desa baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa. Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah merekrut sekitar 26 ribu tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia.

Teks lin Kurniati



RESEP GOBEL MELEWATI MASA KRISIS

Rahmat
Gobel di
lapangan.

Foto
Dok. Pribadi

Rachmat Gobel adalah salah satu pengusaha Indonesia yang berhasil melewati sejumlah kesulitan ekonomi di masa lalu. Pria yang mengendalikan Panasonic Gobel Group ini merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel. Ketika krisis multidimensi melanda Indonesia tahun 1998, banyak kelompok usaha besar yang terpuruk. Sebaliknya, jaringan usaha Gobel tetap bertahan dan justru mampu mengembangkan usaha.

Rachmat mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar yang potensial, bagi industri apapun dan dalam kondisi apapun. Dengan sumber daya alam yang melimpah, sangat disayangkan apabila “kue” pasar ini hanya dinikmati oleh produsen dari negara lain. Perlambatan ekonomi saat ini justru dapat dijadikan momentum memberdayakan kemampuan lokal untuk membangun industri tanah air. Apalagi, industri dengan *local content* besar telah terbukti lebih tahan terhadap krisis. “Sekarang tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi pasar agar menjadi nilai tambah bagi bangsa ini. Orang asing saja melakukan investasi jangka panjang di sini. Kita seharusnya lebih optimis lagi karena kita yang lebih tahu,” ujarnya.

Rachmat menceritakan, ketika ayahnya Thayeb Gobel memelopori industri elektronik Indonesia pada awal tahun 50an, kondisi ekonomi masih sangat sulit. Meskipun saat itu infrastruktur listrik sangat minim, namun almarhum sudah melihat kebutuhan ke depan akan radio transistor. Pemikirannya adalah agar pidato Presiden Soekarno ketika itu bisa didengar hingga ke desa-desa. “Sejak dulu almarhum sudah berpikir untuk membangun industri nasional. Hingga saat ini, bagi saya dalam setiap kesulitan akan selalu ada peluang, *ngga* ada pesimisme” tuturnya.

Kelihaian Rachmat dalam mengendalikan jaringan bisnis membutuhkan intuisi dan manajemen yang mumpuni. Rachmat mengaku, dari waktu ke waktu dirinya selalu melakukan evaluasi sehingga segala resiko ekonomi bisa dikelola. Baginya, bisnis ibarat roda berputar. Ketika kondisi sedang baik, suatu saat pasti akan turun. Begitu pula ketika sedang turun, justru ada kesempatan untuk naik. Sebab itu, sebagian keuntungan perusahaan selalu disisihkan untuk dana cadangan. Dengan begitu, perusahaan relatif lebih memiliki ketahanan dan siap menghadapi turbulensi ekonomi.

Di samping itu, Rachmat juga menyadari pentingnya pengembangan produk dan perencanaan pemasaran. “Produk kita tidak bisa tetap sama, harus ada pengembangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Misalnya ketika ada kenaikan tarif listrik, kita bikin

produk yang hemat energi, ramah lingkungan dan kualitasnya baik. Kondisi ekonomi yang naik turun itu sudah biasa. Di situ pentingnya komitmen dalam membangun industri demi pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.

Meski demikian, Rachmat menekankan bahwa membangun industri tidak identik dengan membangun dan alat-alat produksi semata. Baginya, mengembangkan potensi manusia di balik produk yang unggul justru menjadi tujuan utama pembangunan industri. “Kesejahteraan rakyat bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga transfer keahlian. Kalau kita kuasai semua ilmunya, setiap industri akan bisa berkembang jadi industri strategis”, tukas Rachmat.

Dijelaskan Rachmat lebih lanjut, tiap industri memerlukan mata rantai yang kuat. Mulai dari pengadaan dan pengolahan bahan baku, pembuatan komponen dengan dukungan *supporting industry*, keteraturan jaringan logistik, hingga penjualan dan purna jual. Semuanya harus menjawab kebutuhan konsumen.

Rachmat mengingatkan agar pemerintah melakukan antisipasi krisis jangka panjang. Produk Indonesia tak kalah berkualitas dengan produk impor. Namun pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal bermutu rendah. *Standar Nasional Indonesia* (SNI) juga harus diterapkan secara serius. Selain untuk menjaga persaingan yang sehat, juga untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. “Keuntungan itu bukan sekedar angka, tetapi juga apresiasi konsumen atas produk yang mereka gunakan. Nilai tambah ini juga merupakan salah satu cara melewati krisis,” jelasnya.

Pada akhirnya, Rachmat berharap ragam dan kuantitas produk yang diproduksi di Indonesia bisa terus ditambah. “Apalagi dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah, jadikan Indonesia basis produksi pasar ekspor dan domestik. Sebisa mungkin kebutuhan dalam negeri diisi dengan produk dalam negeri”, tutupnya.

Teks Irma Kesuma Dewi

SUDAH BUKAN SAATNYA FOYA-FOYA



Ketua Tim Ahli
Wakil Presiden
Sofyan Wanandi.

Foto
Aditya Arifiyanto

Kondisi ekonomi saat ini bagaikan gurun gersang. Paket Kebijakan Ekonomi bisa diibaratkan oase di tengah kekeringan.

Di tengah kelesuan situasi ekonomi, Pemerintah berusaha meningkatkan angka pertumbuhan melalui investasi dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu, diluncurkanlah Paket Kebijakan Ekonomi yang terdiri dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, II, III, IV, dan V. Ke depan, bukan tak mungkin akan dikeluarkan paket kebijakan lanjutan. Simak wawancara Media Keuangan beberapa waktu lalu dengan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi.

Perekonomian Indonesia saat ini menjadi sorotan, terutama saat nilai tukar Rupiah melemah terhadap dollar Amerika Serikat. Menurut pandangan Anda, bagaimana situasi perekonomian saat ini? Apakah Indonesia bisa dikatakan sedang dalam kondisi krisis?

Jangan kita bandingkan situasi ini dengan krisis tahun 1998. Tahun 1998 kita mengalami krisis di dunia *finance*, sedangkan permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah penurunan sektor riil. Hal ini dikarenakan komoditas-komoditas kita menurun. Bukan hanya harganya yang turun, tapi juga jumlah yang kita jual menurun. Akibatnya, kita menghadapi kendala dengan menurunnya jumlah ekspor. Pertumbuhan impor kita yang tadinya cukup tinggi akhirnya juga menurun karena permintaan dalam negeri kita menurun.

Penurunan komoditas ini terjadi paling parah di kota-kota di pulau Sumatra dan Kalimantan. Akhirnya semuanya berimbas ke pulau Jawa sebagai tempat produksi dan manufaktur. Daya beli yang menurun itu menyebabkan banyak tenaga kerja kita terkena Pemutusan

Kita harus bekerja keras bersama, tidak bisa saling menyalahkan. Semua harus bekerja keras, termasuk pemerintah, parlemen, dan kehakiman. Sudah bukan saatnya foya-foya.

Hubungan Kerja (PHK). PHK saat ini banyak terjadi ke industri kelapa sawit, batu bara, dan pertambangan lainnya. Itu yang sebenarnya terjadi di dalam negeri sehingga industri kita mengalami penurunan.

Ada pendapat yang mengutarakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor global. Bagaimana tanggapan Anda?

Pengaruh nomor satu itu dari ekonomi global. Nomor dua adalah kelakutan kita sendiri yang harus diperbaiki melalui birokrasi. Selain itu juga perlu mempercepat infrastruktur, khususnya listrik.

Dunia ini sudah *over production*. Perekonomian Tiongkok, Jepang, Amerika, dan Eropa tidak tumbuh. Dunia ini membuat efek juga kepada Indonesia. Partner dagang kita sekarang, terutama China, juga mengalami penurunan ekonomi. Dulu angka pertumbuhannya bisa mencapai dua digit, sekarang mungkin tumbuh di bawah tujuh persen. Imbasnya, permintaan kepada komoditas kita juga menurun. Ini mungkin cukup lama ya, tiga sampai lima tahun ke depan kita akan menghadapi yang sama.

Pemerintah telah menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II, III, IV, dan V untuk memulihkan kondisi perekonomian saat ini. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah langkah ini cukup efektif?

Selama bertahun-tahun kemarin, kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah kita, yaitu membenahi infrastruktur. Kita membiarkan semua daerah dan semua kementerian memberlakukan macam-macam regulasi yang menimbulkan *high cost economy*. Saat ini semuanya serba sulit. Bagaimana mau melawan kalau infrastruktur tidak ada, jalan tidak ada, listrik tidak ada, pelabuhan pun macet. *High cost economy* kita bila dibandingkan dengan rata-rata negara Asia lain kita mungkin sudah 12-15 persen, negara Asia rata-rata 5 persen. Kita bahkan tertinggal jauh dari Vietnam.

Nah, dengan situasi sulit seperti saat ini semua orang mengeluh, tapi apa yang mau dilakukan? Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah. Hal penting yang bisa kita jalankan adalah cepat mengadakan deregulasi semua peraturan-peraturan yang *overlapping* dan semua hal yang menimbulkan *high cost economy* itu bisa hapuskan. Paket Kebijakan Ekonomi ini yang harus kita lakukan karena prosesnya tidak memerlukan biaya besar. Birokrasi harus lebih kita efisienkan.

Bagaimana Anda memandang respon masyarakat atas kebijakan ini?

Menurut saya, Paket Kebijakan Ekonomi III lebih positif karena langsung dirasakan sekarang oleh masyarakat. Paket Kebijakan Ekonomi I dan II itu masih dipertanyakan oleh kalangan pengusaha, apakah ini benar atau tidak, apakah ini janji kosong atau tidak. Paket kebijakan ini ada yang bersifat jangka pendek dan jangka menengah.

Salah satu program kebijakan adalah percepatan infrastruktur, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saat ini Pemerintah juga sudah mulai melakukan kontrak-kontrak dengan pengusaha, *down payment* juga sudah dibayarkan. Efeknya sudah terlihat positif, naiklah pembelian semen dan besi kita. Kondisi yang mulai membaik ini harus kita jaga supaya fundamental perekonomian tetap baik. Kalau tidak, nanti *jeblok* lagi Rupiah kita.

Bagaimana seharusnya dunia usaha menyikapi situasi ekonomi saat ini?

Para pengusaha benar-benar harus *survive* karena mereka tidak bisa menjual barang mereka. Mereka harus meng-*cut* segala *cost* yang tidak perlu, bahkan sampai memberhentikan pekerja. Jangan dipikir pengusaha itu bisa bertahan kalau dia tidak bisa bersaing. Kalau pemerintah tidak membantu dunia usaha dengan mengurangi *illegal import* ini ya susah.

Pengusaha juga mengalami situasi yang tidak enak seperti saat ini. Jadi semua yang pengusaha hadapi adalah bagaimana menjaga agar tidak rugi, bagaimana agar bisa membayar karyawan, bagaimana agar bisa membayar bahan baku, dan lain-lain. Saat ini mereka mencari untung sekecil mungkin untuk bertahan agar tidak bangkrut, meskipun banyak juga usaha mereka yang sudah mati.

Kemudian, apa saran Anda agar masyarakat tetap optimis terhadap perekonomian sekarang?

Kita semua tentu harus optimis, saya optimis pertengahan tahun depan angka pertumbuhan kita bisa di atas lima persen. Kita harus bekerja keras bersama, tidak bisa saling menyalahkan. Semua harus bekerja keras, termasuk pemerintah, parlemen, dan kehakiman. Sudah bukan saatnya foya-foya. Paket kebijakan ini sudah baik, tinggal pelaksanaannya saja.

Teks Pradany Hayyu



Penyerahan Penghargaan WTP Kepada Kementerian Keuangan

Foto
Anas Nur Huda

Peningkatan Opini WTP Menuju Era Akrua

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 di aula Dhanapala, Jakarta, Jumat (02/10). Pada acara ini, pemerintah juga memberikan penghargaan bagi 62 Kementerian Negara/Lembaga serta 225 pemerintah daerah yang laporan keuangannya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan bahwa peningkatan opini WTP di sejumlah Kementerian/Lembaga menjadi prestasi tersendiri untuk mendukung kesuksesan pelaporan akrua di tahun 2015. "Opini audit yang baik di era akuntansi kas menuju akrua ini, merupakan capaian berharga serta menjadi *milestone* dalam memasuki era baru akuntansi dan

pelaporan keuangan berbasis akrua," ungkap Menkeu.

Bila dibandingkan tahun 2006, jumlah Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini WTP mengalami peningkatan signifikan dari 7 LKKL menjadi 62 LKKL. Sebaliknya, jumlah LKKL yang mendapatkan opini *disclaimer* menurun dari semula sebanyak 36 LKKL (2006) menjadi 7 LKKL (2014).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengelolaan keuangan. "Pengelolaan keuangan negara yang baik ialah unsur untuk mencapai *good governance*. APBN yang meningkat menuntut pengelolaan keuangan yang tertib," katanya.

Menko juga menyampaikan harapannya untuk K/L yang belum mencapai WTP agar terus berupaya

melakukan perbaikan. Ia juga menginstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua. "Rakernas APK dapat menjadi momentum untuk bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah," tegasnya.

Sebagai informasi, penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 menjadi penyusunan laporan keuangan terakhir yang menggunakan basis akuntansi Kas Menuju Akrua atau Cash Toward Accrua. Untuk Tahun 2015, Laporan Keuangan pemerintah sudah diwajibkan menggunakan basis Akrua. Terakhir, pemerintah berharap Rakernas ini dapat meningkatkan komitmen para pengelola keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel.

Teks Amelia Safitri



Kegiatan
Pemusnahan
Miras Ilegal

Foto
Kukuh Perdana

Pemusnahan Miras, Bahan Baku Miras, dan Rokok Ilegal

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi memimpin pemusnahan minuman keras, etil alkohol, serta rokok ilegal, Selasa (6/10) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jakarta sejak 1 Januari 2015.

Secara rinci, total terdapat 12.967 botol atau setara dengan 6.181,4 liter minuman keras (Minuman Mengandung Etil Alkohol/MMEA) ilegal berbagai merek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.767 botol atau sekitar 4.381,4 liter diantaranya merupakan minuman keras impor. Sementara sebanyak 7.200 botol atau sekitar 1.800 liter sisanya merupakan minuman keras produksi lokal.

Dirjen Bea dan Cukai mengungkap-

kan, minuman keras yang dimusnahkan tersebut terindikasi terdapat pelanggaran, salah satunya karena tidak dilekati pita cukai yang sah. Selain itu, beberapa di antara minuman keras ilegal tersebut diketahui merupakan minuman keras palsu yang produksinya dilakukan di dalam negeri. Bila dikalkulasi, potensi kerugian negara yang timbul dari minuman keras impor ilegal tersebut mencapai 4,65 miliar sementara kerugian dari minuman keras produksi lokal mencapai Rp99,4 juta.

Disisi lain, DJBC juga memusnahkan 11.400 liter Etil Alkohol (etanol) ilegal. "57 drum etanol ini merupakan bahan baku (pembuatan) minuman keras palsu yang dikerjakan oleh pabrik tidak resmi," ungkapnya. Etil alkohol ilegal tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan potensi kerugian negara yang timbul mencapai Rp228 juta.

DJBC juga memusnahkan rokok ilegal yang melanggar Undang-Undang tentang Cukai. "Telah dilakukan penindakan sekitar dua juta batang rokok (ilegal) (dengan) potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp900 juta," ungkapnya.

Sebagai informasi, Kanwil DJBC Jakarta sendiri telah melakukan operasi besar-besaran di wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak tiga bulan lalu. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo kepada DJBC untuk penertiban peredaran dan konsumsi minuman keras. "Kami harap ini tidak akan berhenti sampai di sini, operasi ini akan terus kami lakukan," ungkap Kelapa Kanwil DJBC Jakarta, Oza Olavia.

Teks Novita Asri



Cara Hatta Mencintai Indonesia

Mohammad Hatta, merupakan tokoh pahlawan nasional yang memiliki andil besar dalam proklamasi kemerdekaan. Pria yang akrab disapa Bung Hatta ini juga dikenal sebagai pelopor koperasi, dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Perjalanan hidupnya yang penuh kejujuran dan kesederhanaan menempatkannya sebagai tokoh teladan di negeri ini. Memperingati Hari Pahlawan, Media Keuangan menuliskan keseharian Bung Hatta di masa hidupnya. Berikut petikan cerita putri sulung beliau, Meutia Hatta.

Seberapa dekat Bung Hatta dengan putri-putrinya?

Ayah kami mencintai anak-anaknya. Beliau tidak pernah kasar dan selalu memperlakukan kami dengan

sopan. Contohnya, karena kami semua perempuan, maka kalau mau masuk kamar, ayah mengetuk pintu dahulu.

Ayah selalu berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kepada anak-anak beliau tidak pernah menyebut kata ganti orang kedua “kamu”, melainkan selalu menyebut nama. Contohnya, “Coba Meutia baca petunjuk ini, kemudian ikuti dengan baik”. Kepada adik saya, “Gemala, tolong beritahu Ibu bahwa seperempat jam lagi kita berangkat”, dan “Halida, bagaimana les piano hari ini, sudah lancar semuanya?”.

Bagaimana peran Bung Hatta sebagai kepala keluarga?

Beliau memimpin keluarga dengan memberi contoh. Ayah membimbing kami untuk mengerjakan kegiatan rutin sesuai urutan dan waktu yang

dijadwalkan. Kalau ada kegiatan tambahan, akan diberitahukan jauh-jauh hari sehingga kami sudah siap. Semua ini merupakan pendidikan untuk bekerja tertib dan teratur.

Bung Hatta hidup sederhana. Namun bukan berarti ayah dan ibu tidak memiliki pakaian yang bagus. Bagaimana pun beliau harus tampil dalam berbagai acara yang menuntut penampilan prima. Namun secukupnya saja, tidak berlebihan. Beruntung Ibu memiliki selera tinggi dalam memilih pakaian. Meski bukan dari bahan mahal, tetapi kalau Ibu yang memakai kelihatannya mewah. Ibu pandai memadu-padankan pakaian dan aksesori. Cara berjalannya pun anggun.

Ibu memiliki koleksi batik dari desainer kelas satu seperti Iwan Tirta dan Go Tik Swan. Namun cara ibu memilih barang selalu cermat. Saya

sering berolok-olok bahwa setiap perempuan selalu mata keranjang terhadap barang-barang, dan itu manusiawi. Namun membeli barang kesayangan seharusnya juga disertai tujuan membawa nama Indonesia. Apalagi berbagai *works of art* karya perempuan Indonesia luar biasa bagusnya.

Ibu bukan pegawai negeri atau ketua organisasi. Namun ibu merupakan ibu rumah tangga yang berkualitas dan mampu menjadi panutan. Beliau belajar terus secara otodidak dengan dorongan ayah. Jika melihat rumah peninggalan ayah, tak ada yang baru di situ. Namun dengan pemeliharaan, maka yang sederhana menjadi memiliki nilai tambah nonmaterial yang anggun.

Nilai-nilai berbangsa apa saja yang ditekankan Bung Hatta?

Perasaan mencintai bangsa dan negara. Kami diajar untuk menghargai kebudayaan Indonesia dari suku yang berbeda. Salah satu unsur budaya yang penting adalah makanan. Lauk-pauk dari berbagai daerah disajikan bergantian pada makan siang dan makan malam sehari-hari. Kami juga sering diajak ke desa-desa agar mengenal penduduk dari kelas bawah. Dari kecil kami dibiasakan memakai kain kebaya pada acara-acara penting seperti 17 Agustus. Begitu pula saat kami diundang pada resepsi Kedutaan Besar negara-negara sahabat. Kami juga ikut dalam kunjungan kerja ayah ke daerah. Hal lain, membaca buku-buku sejarah Indonesia, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tanggap atas berita-berita yang terjadi di tanah air.

Bagaimana Bung Hatta mengisi waktu senggang?

Ayah senang berjalan kaki mendaki lereng dan bukit kebun teh, mengenal masyarakat desa, serta mengunjungi daerah-daerah yg tidak jauh dari Jakarta. Ini merupakan pendidikan mencintai Indonesia. Kami juga dibawa menuntun pagelaran puisi, tari dan drama, terutama yang digelar oleh tokoh-tokoh seni seperti Rendra. Kami juga pergi ke pameran lukisan, konser musik

klasik di Radio Republik Indonesia dan Departemen Penerangan (dulu belum ada *concert hall* seperti sekarang). Di lain waktu kami mengunjungi acara seni di Taman Ismail Marzuki. Saat liburan sekolah, kami menengok nenek di Sumedang bersama paman (adik ayah) dan keluarganya.

Seperti apa Bung Hatta sebagai pejabat negara?

Ayah selalu taat aturan, terutama menyangkut keuangan. Sebagai proklamator dan Wakil Presiden RI beliau mendapat fasilitas negara untuk berobat ke luar negeri. Ayah pernah sakit dan menggunakan fasilitas itu. Karena sifat tertibnya, bukan bukti-bukti

Bagi kami Pemuda Indonesia, kami lebih senang melihat bangsa Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel abadi bangsa asing.

Moh. Hatta

pengeluaran saja yang dilampirkan. Uang kelebihan biaya akomodasi juga dikembalikan ke Sekretariat Negara (Setneg). Prinsip membedakan milik negara dari milik pribadi ini ditularkan ayah kepada kami. Ketika Ibu kangen kepada adik saya Halida yang menjadi anggota Dharma Wanita di Colombia, ibu tak lupa mengingatkan, “Kita telepon secukupnya saja. Telepon ini dibiayai Setneg, kasihan kalau negara harus membayar banyak”.

Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Bung Karno dan Bung Hatta?

Pembawaan keduanya berbeda. Namun tekad mereka untuk membangun bangsa dan negara selalu sama. Bung Karno menggebu-gebu dan mampu menyampaikan pesan secara

gambang sehingga mudah dimengerti rakyat. Sebaliknya, Bung Hatta lebih sebagai tokoh pemikir yang merancang prinsip untuk mencapai kejayaan bangsa ini.

Bung Hatta menyumbang pemikiran bagi isi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan 34. Beliau juga memberi usulan untuk bunyi pasal-pasal tertentu yang diwarnai prinsip menegakkan hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia. Banyak kegagalan terjadi karena prinsip-prinsip pada UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik.

Bung Hatta memiliki banyak sekali buku. Bagaimana buku tersebut dimanfaatkan?

Sejak bersekolah di Prins Hendrik School, Batavia (Jakarta) tahun 1919, ayah sudah mengoleksi buku. Ketika belajar di Belanda, buku-buku itu bertambah. Beliau sadar dirinya tidak saja harus menjadi pejuang, tetapi juga kalau Indonesia merdeka, harus menjadi pemimpin bangsa yang handal. Sebab itu, ayah juga mengambil mata kuliah ketatanegaraan, hukum, filsafat, administrasi negara, dan sosial-politik yang diperlukannya sebagai negarawan kelak.

Didorong tekad melengkap diri dengan berbagai pengetahuan, masa studi ayah di Belanda bertambah panjang hingga sebelas tahun. Beliau kemudian menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia yang terus menanamkan gagasan kemerdekaan. Ayah pernah dipenjara di Den Haag selama lima bulan karena dianggap memberontak. Pengacaranya terdiri dari tiga orang Belanda. Ayah diadili bersama empat mahasiswa Indonesia yang juga anggota Perhimpunan Indonesia.

Pembacaan pidato pembelaan beliau berlangsung tiga setengah jam dalam Bahasa Belanda. Bung Hatta memasukkan kata-kata, “Bagi kami Pemuda Indonesia, kami lebih senang melihat bangsa Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel abadi bangsa asing”. Pidato pembelaan (*pledooi*) itu juga dilengkapi dengan referensi untuk membela perjuangan Perhimpunan Indonesia. Hakim kemudian menyatakan ayah tidak



Meutia Hatta bersama suami dan anak.

Foto
Dok. Pribadi

bersalah dan bebas dari segala tuduhan. Itulah manfaat dari koleksi buku-bukunya.

Bagaimana kondisi buku-buku tersebut saat ini?

Zaman terus berkembang, koleksi buku ayah dibawa ke tempat pembuangan di Boven Digoel (Papua). Di pembuangan, ayah terus memikirkan nilai dan norma yang harus dimiliki jika Indonesia merdeka. Buku-buku bacaannya menjadi inspirasi bagi penulisan brosur dan buku-buku pentingnya. Salah satu buku kecilnya adalah “Ke Arah Indonesia Merdeka” (ditulis tahun 1932 di Bukittinggi) yang menegaskan pemikiran beliau mengenai bentuk dan arah Negara Republik Indonesia kalau merdeka kelak. Saat

itu ayah pun belum mengetahui kapan Indonesia akan merdeka.

Ketika wafat beliau memiliki sekitar 8.000 buku. Sebagian lagi sekitar 2.000 buku disumbangkan ke Perpustakaan Yayasan Hatta yang dibangun oleh Bapak Margono Djojohadikusumo yang memimpin Bank Negara Indonesia (BNI) tahun 1946. Semasa hidup ayah merawat buku-bukunya dengan baik. Kini perawatan perpustakaan itu menjadi tanggung jawab putri-putrinya.

Apa saja pandangan Bung Hatta yang masih relevan hingga saat ini?

Beberapa di antaranya pada tahun 1960 Bung Hatta mengingatkan bahwa partai jangan menjadi ajang mencari nafkah di Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau juga mengatakan bahwa

pendidikan harus menjadi sarana mendidik karakter, selain mendidik ilmu pengetahuan. Menurut Bung Hatta, pinjaman luar negeri merupakan dana pelengkap pembangunan Indonesia dan bukan merupakan dana utama.

Kaderisasi dalam pemerintahan dan berbagai bidang lain harus dilakukan. Hal ini penting, apalagi pada awal pembangunan nasional kita masih menggunakan tenaga ahli asing. Perlu ada transfer pengetahuan, sehingga lambat laun perusahaan negara yang penting dalam pembangunan nasional dipimpin oleh orang Indonesia sendiri dan tidak selamanya dipegang orang asing.

Teks Dwinanda Ardhi

Tampil dengan PACAK

KPKNL Pangkalpinang, DJKN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang patut berbangga menjadi salah satu dari 12 peserta Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) 2015. Berikut laporan Media Keuangan saat berkesempatan berkunjung ke sana.

Kota Pangkalpinang kini bukanlah kota yang dipandang sebelah mata. Pangkalpinang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tujuan para wisatawan yang ingin menikmati pesona Indonesia, khususnya keindahan Provinsi Bangka Belitung. KPKNL Pangkalpinang hadir melayani kebutuhan masyarakat atas pengelolaan kekayaan negara. Kepala KPNL Pangkalpinang Sumurung Siahaan berbagi cerita mulai dari sejarah hingga capaian unit yang dipimpinnya ini.

Sejarah

Pada tahun 2007, KPKNL Pangkalpinang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan KPKNL. Meskipun berdiri pada tahun 2007, namun sejak tahun 2002 telah terbentuk Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Pangkalpinang.

Demi meningkatkan kinerja pengelolaan kekayaan negara yang profesional, tahun 2014

KPKNL Pangkalpinang resmi menempati gedung baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pangkalpinang. Sumurung menjelaskan, kebutuhan gedung baru ini sudah dirasakan sejak lama mengingat kondisi kantor yang lama tidak dapat menampung aktivitas KPKNL yang kompleks. “Sejak tahun 2002 kami menyewa rumah dinas orang pajak (Direktorat Jenderal Pajak) untuk dijadikan kantor. Kondisinya tidak memadai karena sangat sempit,” tutur Sumurung.

Gedung baru KPKNL Pangkalpinang ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dan Walikota Pangkalpinang M. Irwansyah pada 4 Februari 2014.

Pembangunan gedung yang memakan waktu sebelas bulan ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merupakan pembangunan fisik gedung yang dimulai pada tanggal 13 Agustus 2012 hingga berakhir pada 10 Desember 2012. Tahap kedua merupakan tahap lanjutan berupa *finishing* yang dimulai pada tanggal 18 Februari 2013 hingga 17 Juli 2013.

Menempati lahan seluas 500 meter persegi, KPKNL Pangkalpinang berada di kawasan strategis yang bertetangga dengan unit usaha besar, seperti PT. Timah Tbk. Demi lancarnya proses pembangunan gedung berlantai tiga ini, jajaran KPKNL Pangkalpinang rutin melakukan pengecekan sistem bangunan. Akhir pembangunan tahap kedua, KPKNL Pangkalpinang juga melakukan kunjungan bersama dengan pengawas, Direksi Teknis, Panitia Penerima hasil Pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat



Kepala KPKNL
Pangkalpinang,
Sumurung.

Foto
Rita Nurhayati



Gedung KPKNL
Pangkalpinang.

Foto
Rita Nurhayati

Komitmen (PPK). Hal ini bertujuan agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Sumber Daya Manusia

Kinerja KPKNL Pangkalpinang saat ini digerakkan oleh 21 orang pegawai. Sumurung menegaskan, sumber daya manusia sejumlah itu masih kurang untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Pangkalpinang. Sebanyak 21 orang pegawai sudah meliputi kepala kantor, kepala seksi, pejabat lelang, dan bendahara. “Pekerjaan pejabat lelang dan bendahara pengelola sudah tidak bisa diganggu, mereka sangat sibuk. Total hanya ada sebelas staf. Sebelas pegawai itu harus ‘merangkul’ seluruh Kepulauan Bangka Belitung,” jelasnya.

Minimnya pegawai menuntut seluruh jajaran KPKNL Pangkalpinang menjadi multikompetensi. “Pegawai yang menangani lelang jangan hanya mengetahui mengenai lelang saja, tapi juga memahami masalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan sebagainya,” kata Sumurung. Ia juga mendorong para pegawainya untuk meningkatkan kompetensi melalui program diklat yang diselenggarakan kantor pusat.

Menjadi Kantor Percontohan

Tahun 2015 ini menjadi tahun yang bermakna bagi Sumurung. Unit yang dipimpinnya terpilih menjadi salah satu

peserta Penilaian KPPc. Penilaian yang dilakukan pada tanggal 16-17 September 2015 lalu dilakukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Saat proses penilaian, Samurung mempresentasikan inovasi yang dilakukan KPKNL Pangkalpinang, yaitu penerapan aplikasi SIPACAK (Sistem Informasi Pencarian Arsip Cepat Aplikasi Kantor). Tujuan aplikasi ini adalah untuk mempercepat pencarian arsip, misalnya arsip risalah lelang. Harapannya, *stakeholders* KPKNL Pangkalpinang dapat merasakan manfaat dari aplikasi ini. Pelayanan pencarian arsip kini semakin cepat dan diharapkan dapat meningkatkan sinergi di internal KPKNL Pangkalpinang.

Senada dengan terobosan aplikasi SIPACAK, KPKNL Pangkalpinang juga memiliki motto PACAK yang merupakan singkatan Profesional, Akuntabel, Cerdas, Amanah dan Kesempurnaan. Pacak dalam bahasa Bangka berarti optimalisme yang terbaik. Motto inilah yang diselaraskan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam melakukan kinerja terbaik. Hal ini membuktikan bahwa minimnya pegawai bukan berarti minim pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Tak ada pekerjaan yang bebas

hambatan. Begitu pula yang dirasakan Simurung yang menjabat sebagai Kepala KPKNL Pangkalpinang sejak Januari 2014. “Salah satu tantangan terberat adalah penagihan piutang negara,” tuturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, piutang negara berasal dari perbankan atau Badan Usaha Milik Negara. Namun kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa piutang negara hanya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Jadi berkas pun menurun drastis. Waktu saya masuk, di sini masih ada 500 lebih berkas, nah sekarang tinggal 50,” jelas Sumurung.

Seiring dengan banyaknya kebutuhan masyarakat akan pelayanan KPKNL Pangkalpinang, Sumurung berharap bisa menambah jumlah sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, ia juga berharap ada perbaikan sarana dan prasarana. “Saat ini kami ada lima mobil dinas, dua diantaranya rusak ringan dan satu rusak berat,” jelasnya.

Penilaian KPPc tahun 2015 ini diharapkan tidak menjadi akhir kerja keras seluruh pegawai KPKNL Pangkalpinang. Justru diharapkan seluruh pegawai lebih mengembangkan potensi yang ada demi menciptakan terobosan yang berguna bagi masyarakat. Dengan selalu merapkan motto PACAK dalam bekerja, seluruh jajaran pegawai KPKNL Pangkalpinang akan mampu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.

Teks Pradany Hayyu

RM Wiwieng Handayaningsih

Kuncinya Komunikasi

“Kita harus menjadi bermanfaat bagi sesama, dimanapun kita berada. Kalau di kantor, bermanfaat untuk kantor, kalau di rumah bermanfaat untuk keluarga. Kuncinya bagaimanapun juga harus menjaga komunikasi.”

Foto
Arfindo Briyan S.



Bayi yang belum genap berusia satu tahun itu diboyong orangtuanya dari rumah dinas mereka di Ambarawa ke rumah pribadi di Salatiga. Bukan tanpa alasan, kepindahan ini dilakukan karena pada periode tahun 1960-an sang pemberi nafkah keluarga hampir memasuki masa akhir kerja. Dialah Wiwieng Handayaningsih, putri Sudino Sumo Prabowo, seorang Kepala Sekolah Polisi Negara.

Sedari kecil, ayahnya yang seorang guru olahraga polisi telah menanamkan bahwa kedisiplinan merupakan hal utama. Sikap dasar itulah yang mampu membentuk karakter Wiwieng menjadi pribadi yang selalu sadar bila ada kesalahan akan segera memperbaikinya.

Saat tengah duduk di kelas satu sekolah menengah atas, sang ayah dipanggil Yang Maha Kuasa. Sejak itulah, masa kecil anak kelima dari tujuh bersaudara ini dilalui secara sederhana. Barliani, sang ibu, berjuang menghidupi ketiga putrinya yang masih belia dengan berbekal penghasilan dana pensiun seadanya sementara keempat kakaknya telah mandiri berkeluarga.

Ibu kemudian menjadi sosok paling dominan dalam hidupnya karena tetap *survive* dengan ketiga anak perempuannya meskipun tidak bekerja. Dalam hal pendidikan, kenang Wiwieng, ibu lah yang menanamkan pemikiran bahwa tidak boleh ada kata tertinggal untuk terus melanjutkan sekolah ke tahap berikutnya.

“Ibu saya cantik dan senyumnya adem. Kalau dikerasin bapak, itulah obatnya. Setelah ayah meninggal, ibu membuat kita tegar, membuat kita kuat. Beliau banyak menginspirasi saya untuk bisa membagi waktu, harus disiplin dan mengajari untuk sekolah sambil bekerja,” ujar Wiwieng dengan mata berkaca-kaca.

Akhirnya tahun 1981, lulusan SMAN 1 Salatiga ini memutuskan hijrah ke ibukota. Kala itu, penerimaan pendaftaran mahasiswa di sejumlah universitas telah ditutup. Tak putus asa, Wiwieng mendaftar di gelombang terakhir fakultas hukum Universitas

Krisnadwipayana, Jakarta dan diterima disana. Sambil menunggu waktu kuliah pada sore hari, setiap pagi Wiwieng membuat kue-kue yang dititipkan pada warung sekitar tempat tinggalnya.

Tiga tahun kemudian, Wiwieng mengikuti ujian masuk Kementerian Keuangan di lapangan banteng. Beruntung, Wiwieng lolos dan langsung ditempatkan di Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK) yang kini dikenal dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek).

Tahun 2005, Wiwieng pindah ke Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan. “Saya kuliah sore di fakultas hukum Unkris tapi pagi oleh PAIK disekolahkan sebagai *programmer* dan *system analyst*. Berbarengan antara kuliah dan menata karier di Kementerian Keuangan,” katanya.

Berlatar pendidikan hukum dan informasi teknologi, Wiwieng dipercaya menduduki sejumlah jabatan dengan berbagai bidang yang berbeda. Mulai dari pranata komputer, pengelolaan penerusan pinjaman BUMN, kepegawaian sampai diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pertama

Sepanjang berkari di Kementerian Keuangan, dalam kurun waktu tahun 2006 hingga 2011, Wiwieng kerap kali mengalami hal-hal yang menarik sekaligus menantang bagi dirinya.

Pertama, ketika Wiwieng menjabat sebagai Kasubdit pinjaman BUMN di Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang sekarang menjadi Direktorat Sistem Manajemen Investasi. “Itu dunia pertama saya di luar dunia IT (Informasi Teknologi) di Kementerian Keuangan.”

Masa itu, Wiwieng diberi tugas untuk melakukan restrukturisasi pinjaman BUMN karena BUMN mengalami kondisi *default* atau gagal bayar kepada pemerintah. Ini kali pertama Kementerian Keuangan menyusun regulasi terkait restrukturisasi pinjaman BUMN.

Disitulah Wiwieng turut berperan dalam menyusun regulasi. Mulai dari bersinergi dengan unit internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, melakukan *study banding* ke sejumlah bank. Setelah itu melakukan pembahasan dengan BUMN termasuk mempelajari laporan keuangan mereka hingga berhasil menyusun Peraturan



Wiwieng bersama kucing kesayangan di halaman rumahnya

Foto
Dok. Pribadi

TTL

Ambarawa, 16 Februari 1962

PENDIDIKAN

Sarjana Hukum Universitas
Krisnadwipayana, Jakarta
(Lulus tahun 1986)

RIWAYAT JABATAN

Kepala Subdirektorat Hukum
dan Ketaatan Direktorat
Sistem Manajemen Investasi
(2011),
Kepala Subdirektorat
Verifikasi, Setelmen,
Akuntansi, dan Pelaporan
Direktorat Sistem Manajemen
Investasi
(2011-2012),
Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Tengah
(2012-2013),
Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi
Riau
(2013-2014),
Direktur Sistem
Perbendaharaan
(2014-sekarang)

Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan.

Kedua, Wiwieng dipercaya sebagai perempuan pertama yang menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kanwil tersebut membawahi empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu, Poso, Luwu, dan Toli-toli.

Kabupaten Poso menjadi salah satu tempat menarik. Selama ini, Poso dikenal sebagai daerah rawan konflik. Di sejumlah lokasi, masih sering ditemukan bangunan-bangunan bekas terbakar dan hancur. Terlebih lagi, dilihat dari keberagaman penduduk, Poso tergolong daerah yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk.

Disinilah Wiwieng pertama kali menyadari pentingnya komunikasi, terutama dengan pegawai lokal dan pemerintah daerah setempat. "Perlu sangat ekstra hati-hati. Takut salah apa yang diterima dengan apa yang disampaikan. (Perbedaan) Karakter harus disikapi betul-betul (dengan baik) karena manusia itu nomor satu. Penentu sukses atau tidak itu sumber daya manusia, sehingga SDM harus kita bangun," ungkapnya.

Selanjutnya, ketika Wiwieng berkunjung ke kabupaten Morowali, (sekitar 8 jam dari Poso) ternyata belum ada bank persepsi karena adanya aturan dimana Kantor Cabang Pembantu (KCP) belum diizinkan menjadi bank penerima penerimaan negara. Akibatnya, para wajib pajak mengalami kesulitan ketika hendak membayar pajak.

Untuk itu, saat Direktorat Pengelolaan Kas Negara tengah menyusun regulasi tentang perubahan aturan dimana KCP diperbolehkan menjadi bank persepsi, Wiwieng mulai bergerak. Wiwieng mendorong pembentukan bank persepsi pertama di Morowali. "Sekarang sudah berjumlah 15 bank persepsi baru."

Ketiga, pada waktu Wiwieng bertugas sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau, dirinya mempersiapkan pembentukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan pertama di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. "Koordinasi dengan pemerintah daerah, minta lahan kemudian ditindaklanjuti sampai diberikan satu hektar tanah untuk dibangun kantor."

Terakhir, Wiwieng diamanahkan menjadi Direktur Sistem Perbendaharaan saat tengah Ditjen Perbendaharaan tengah mempersiapkan transformasi kelembagaan di unitnya. Dirinya langsung turut berperan dalam menyusun

tugas pokok dan fungsi Direktorat Sistem Perbendaharaan baru yang sekarang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206.

Wiwieng menuturkan terdapat fungsi tambahan seperti penelitian, pengembangan sistem perbendaharaan, dan bantuan hukum keuangan negara. "Kemudian pengembangan profesi perbendaharaan dengan sekitar 28ribu bendaharawan di seluruh Indonesia akan disertifikasi secara bertahap dalam kurun empat tahun," tutur Wiwieng.

Tujuan sertifikasi bendahara tidak lain untuk memastikan bahwa setiap bendahara mempunyai kapasitas yang baik dalam pelaksanaan anggaran. Ke depan, bila kapasitas dalam mengelola keuangan negara baik, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong naik.

Berkebun dan kucing

Di luar rutinitas pekerjaan, istri dari Supratman - pensiunan pegawai Kementerian Hukum dan HAM ini memiliki hobi berkebun. Tidak kurang dari seratus pot berbagai jenis tanaman dan bunga telah menghiasi halaman rumah wanita penggemar jenis tanaman *aglonema*. "Selain (olah raga) jalan kaki dan renang, saya kalau di rumah jadi tukang kebun. Saya suka bercocok tanam mungkin karena saya suka hijau."

Selain berkebun, ibu dari Avila Bundasari Andarwati dan Burbo Pratowo Putro ini juga senang memelihara kucing. Sedikitnya tujuh kucing berjenis angora, persia, himalayan yang dipelihara hingga kini. Hobi ini ternyata mampu mempererat hubungan dengan anggota keluarga. Secara tidak langsung, kata Wiwieng, komunikasi dengan keluarga dan anak-anak terjalin dengan baik melalui hobi bersama tersebut.

Di masa depan, Wiwieng berharap dapat memberi perhatian lebih pada kedua anaknya. "Saya ingin bisa menginspirasi anak-anak saya seperti ibu saya dulu memberi inspirasi kepada saya. Kalau yang lebih dari itu sudah tidak dipikirkan, (cukup) disyukuri dan dinikmati saja."

Teks lin Kurniati

Jangan Biarkan Asap Terus Menyergap

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bencana yang belum terselesaikan, meskipun sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebagaimana dilansir di situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kamis (22/10) masih terdapat 2.742 titik api di negeri ini. Lima daerah dengan titik api terbanyak adalah Papua (744 titik), Sumatera Selatan (703 titik), Kalimantan Tengah (462 titik), Kalimantan Barat (290 titik), dan Kalimantan Timur (153 titik). Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian lebih dari Rp20 triliun akibat bencana asap.

Dalam konferensi pers yang digelar di Graha BNPB, Jakarta (1/10), Willem mengutip data perhitungan Bank Dunia pada 2013 untuk memprediksi kerugian pada tahun ini. Dua tahun lalu, kerugian finansial akibat kebakaran hutan dan lahan di satu provinsi saja, yaitu Riau, mencapai Rp20 triliun. Dia memprediksi nilainya akan lebih besar karena bencana tahun ini melanda di lebih banyak provinsi dan dalam durasi waktu yang lebih panjang. "Jumlah pastinya belum dapat dihitung karena penanganannya masih berlangsung," kata Willem seperti dikutip dari www.kompas.com.

Bencana asap memang sangat memengaruhi kondisi ekonomi daerah yang terimbas. Inisiatif untuk menghitung dampak kerugian ekonomi juga datang dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Ismet Inono, sebagaimana dimuat di situs Kantor Berita Antara mengatakan, "Kita ajak teman-teman akademisi untuk coba bantu melihat berapa kerugian secara ekonomi mengenai asap."

Pemerintah bukannya tak berusaha menangani persoalan asap. Ditemui di Jakarta pada Sabtu (17/10), Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo mengungkapkan bahwa penyebab meluasnya area kebakaran hutan dan lahan tahun ini begitu kompleks. Imam, yang diundang untuk menghadiri rapat di Kantor Kepresidenan untuk membahas masalah ini pada minggu sebelumnya, mengatakan bahwa kemarau panjang dan el nino adalah salah satu pemicu.

Tanpa kemarau panjang, persoalan perusahaan yang membuka lahan di atas tanah gambut, sebagian di antaranya untuk perkebunan kelapa sawit, hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Jika dilihat dari strukturnya, tanah gambut sebenarnya sulit untuk langsung ditanami. Perusahaan industri kelapa sawit mesti membuat kanal-kanal yang panjangnya bisa mencapai dua juta kilometer untuk 'membuang'

air yang terkandung di bagian bawah jenis tanah ini ke laut. 'Supaya keasaman tanahnya menjadi pas untuk tanaman kelapa sawit,' kata Imam. Setelah lahan gambut kering, proses *land clearing* melalui pembakaran menjadi lebih mudah, sekaligus cepat. 'Pada tahun-tahun sebelumnya, kita 'beruntung' karena biasanya turun hujan setelah lahan dibakar. Tahun ini hujan tidak turun-turun,' lanjutnya. Tanpa bantuan hujan, proses pemadaman api menjadi kian sulit.

Imam menyayangkan maraknya praktek-praktek ilegal yang dilakukan perusahaan dalam proses *land clearing*. Menurutnya, imbalance ekonomi yang ditawarkan perusahaan kepada penduduk lokal yang mau membantu membakar lahan menjadi pangkal masalah yang pelik. 'Cara yang benar untuk *land clearing* bisa menghabiskan biaya Rp20 juta rupiah per hektar. Kalau 'titip' kepada penduduk lokal, hanya dengan obat nyamuk saja, biayanya bisa kurang dari satu juta,' ujar Imam.

Namun persoalan mengeringkan lahan gambut ini menimbulkan efek di masa depan. Dengan membuang air dari lahannya, permukaan daratan akan menjadi turun, sedangkan tinggi air laut naik. Dampaknya adalah terciptanya rawa-rawa abadi dan dalam waktu yang permanen di masa depan. 'Jangan sampai Indonesia hancur karena salah dalam mengelola lingkungan,' kata Imam.

Perkebunan yang berkesinambungan

Sebagai sebuah komoditas, kelapa sawit tak bisa dipungkiri menyumbangkan devisa bagi negara, begitu juga dengan produk olahannya. Keberadaan perusahaan kelapa sawit juga membuka lapangan kerja tersendiri. Namun demikian, konsep pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang benar dan *sustainable* mendesak untuk dijalankan di Indonesia.

Dalam pandangan Rauf Prasodjo, konsultan lingkungan lulusan Yale University, konsep ini bisa diimplementasikan asal ada komitmen yang



Kantor
Pelayanan
Pajak Pratama
Pangkalan
Kerinci, Riau,
tertutup asap.
Foto diambil
Jumat (23/10).

Foto
Muhammad Ishak

tinggi dari unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan yang berperan sebagai produsen produk kelapa sawit, perusahaan yang berada dalam rangkaian *supply chain* pada industri kelapa sawit, lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada perusahaan, dan juga konsumen.

Sebuah inisiatif bernama Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), kata Rauf, sudah dicetuskan sejak 2004. Di dalam RSPO terdapat berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, investor, hingga lembaga swadaya masyarakat). RSPO bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menggunakan wadah ini untuk mendesak para pelaku industri kelapa sawit menggunakan standar-standar yang legal dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam pembukaan lahan.

Di samping itu, juga ada gagasan bernama Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah juga dapat memanfaatkan ISPO yang sudah ada sejak 2011 untuk mengurangi cara-cara ilegal dalam bisnis kelapa sawit. Pelaksanaan ISPO dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan, advokasi, dan bimbingan kepada para pengelola perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Proses sertifikasi dijalankan oleh Kementerian Pertanian terhadap para pelaku industri sesuai dengan ketentuan internasional, antara lain memenuhi kaidah International Standard Organization (ISO). 'ISO ini direvisi pada 2015 dan diharapkan menjadi *mandatory* bagi pelaku industri kelapa sawit,' kata Rauf.

Selain kedua wadah di atas, pemerintah dapat mendorong adanya komitmen yang lebih tinggi agar perusahaan tidak melakukan deforestasi dalam menjalankan industri kelapa sawit. Komitmen ini menjadi sangat penting dilakukan di Indonesia yang merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Di samping itu, Rauf juga berpandangan bahwa

masyarakat dapat secara langsung turut serta pada gerakan melawan asap dengan memilih produk-produk yang diketahui proses pembuatannya tidak merusak hutan. 'Mungkin sedikit lebih mahal, tapi kita berkontribusi mencegah kerusakan lingkungan,' ujar pria yang pernah menjadi peneliti di lembaga World Resources International itu.

Penegakan hukum

Ditemui di tempat terpisah, Peneliti Ekonomi Lingkungan dari Badan Kebijakan Fiskal, Joko Tri Haryanto, berpendapat bahwa berlarut-larutnya persoalan kabut asap seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegakkan hukum. "Ancaman dan larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Joko. Para pihak yang dianggap melanggar aturan tersebut dapat diberikan sanksi administratif berjenjang. Mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin. Sanksi tersebut juga tidak membebaskan terdakwa dari putusan pidana.

Belum lama ini, menurut Joko, Mahkamah Agung (MA) baru saja memutus perkara sengketa perusakan hutan dengan penuntut utama pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa. Dalam dakwaannya, MA memenangkan gugatan pemerintah dan menghukum kedua perusahaan itu dengan denda sebesar Rp32 miliar atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan akibat operasional tambang pasir di Desa Simpang Pesak, Provinsi Bangka Belitung.

Putusan ini menjadi angin segar. MA diyakini sudah mulai berjalan di arah kebenaran, meskipun menurut Joko, nilai denda yang dikenakan masih jauh dari tingkat kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. "Putusan tersebut juga tercatat sebagai salah satu *milestone* dalam peradilan lingkungan di

Indonesia karena sudah terlalu banyak perusak lingkungan yang masih bebas tak tersentuh hukum,' kata dia.

Sejak tahun lalu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya juga telah mengesahkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagai pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan adanya UU itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang. UU P3H juga disusun akibat terjadinya perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk di dalamnya antara lain pembalakan liar dan penambangan serta perkebunan tanpa izin. Praktek-praktek ini telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan dampak pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Menurut Joko, implementasi aturan-aturan pengelolaan hutan sangat memerlukan komitmen presiden. "Presiden adalah penguasa tertinggi atas kedaulatan hukum di Indonesia. Hanya dengan kepemimpinan presiden yang betul-betul mau menjalankan perannya, upaya penyelamatan lingkungan dapat ditegakkan," kata Joko. Atas semua kondisi yang sudah dijabarkan dalam kedua regulasi tadi, semestinya sudah tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi kegiatan perusakan hutan dan lingkungan di Indonesia. 'Namun di atas itu semua, pra syarat fundamental yang dibutuhkan adalah adanya kemauan dan keinginan dari pemerintah untuk menjunjung tinggi peraturan di atas segalanya,' ujarnya lagi.

Teks Dwinanda Ardhi



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

BILLING ONLINE

Pembayaran bea masuk,
bea keluar, cukai dan
pajak dalam rangka impor
bisa melalui bank, ATM, internet banking
atau Kantor Pos terdekat.

*Mudah, Fleksibel
dan Real time*



Telah diujicobakan dan diwajibkan pada

1 Januari 2016

Unduh materi dan buku petunjuk di:

<https://goo.gl/BKN9nY>

<https://goo.gl/3OUEya>



"Connecting With Heart"

APBN 2016 dan Pemberdayaan Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto*

Tema Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2016 adalah "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Sebagai bentuk penjabarannya, disusun beberapa agenda prioritas yang mencakup "Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat" yang terdiri atas sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental atau karakter. Yang juga menjadi prioritas adalah "Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan", terdiri atas sektor kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Tak ketinggalan "Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan" baik antar kelompok pendapatan dan wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, maupun Kawasan Timur Indonesia. Prioritas terakhir adalah "Dimensi Kondisi Perlu" meliputi penegakan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, sekaligus tata kelola reformasi birokrasi.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah juga terus berusaha memenuhi berbagai komitmen yang telah disusun dalam visi dan misi presiden. Misalnya, pemenuhan *road map* pembangunan jalan tol 2015-2019, yang menjangkau keseluruhan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nantinya di Sumatera akan dibangun jalan tol sepanjang 384 km, di Jawa sepanjang

1.450,9 km, di Kalimantan sepanjang 84 km, dan di Sulawesi sepanjang 39 km. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *progress* hingga 2014 telah merampungkan pembangunan di Jawa sepanjang 188,8 km. Pada 2015, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan jalan tol di Sumatera hingga 18,17 km, di Jawa akan ditambah 151,04 km, dan di Sulawesi akan dimulai pembangunan awal sepanjang 11,7 km.

Kebijakan untuk terus melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut telah meningkatkan besaran pagu belanja APBN 2016 menjadi hampir Rp2.200 triliun atau meningkat dibandingkan alokasi belanja di APBNP 2015 yang mencapai Rp1.984,1 triliun. Kenaikan beban belanja APBN 2016 tentu mengakibatkan peningkatan besaran target pendapatan negara menjadi Rp1.900 triliun, meningkat dibandingkan target di APBNP 2015 sebesar Rp1.768,9 triliun. Dengan tetap menjaga besaran defisit APBN 2016 di kisaran 1,9-2 persen dari Produk Domestik Bruto atau sama dengan target defisit APBNP 2015 sebesar 1,9 persen dari PDB, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Rencananya, pemerintah masih akan mengandalkan strategi utang dalam upaya menutup defisit APBN tersebut. Kebutuhan penarikan utang 2016 diperkirakan mencapai



Foto
Aditya Ariffianto

sekitar Rp250 triliun hingga Rp300 triliun. Harapannya, utang yang akan diciptakan lebih diprioritaskan kepada pendanaan domestik baik dari sisi korporasi maupun individual, sebagaimana yang sudah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi penting mengingat persoalan utang adalah salah satu isu yang sangat sensitif dan rentan dengan kepentingan politik.

Dengan penempatan prioritas utama di sektor infrastruktur, maka Kementerian Pekerjaan Umum-



Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) kembali menjadi ujung tombak di level implementasi. Kemen PU-Pera akan mendapatkan alokasi sebesar Rp106,4 triliun atau sedikit turun dibandingkan alokasi 2015 sebesar Rp118 triliun. Penurunan tersebut merupakan dampak penguatan anggaran infrastruktur di daerah melalui mekanisme anggaran sektoral (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) serta transfer ke daerah baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta beberapa Dana

Insentif Daerah lainnya. Meskipun demikian, jika dihitung secara kumulatif, anggaran infrastruktur di 2016 tetap mengalami kenaikan hingga Rp100 triliun dari besaran tahun 2015 yang mencapai Rp290,3 triliun.

Pemberdayaan daerah atau desa

Terkait hal tersebut, kajian lebih dalam menjadi menarik. Terlebih dalam beberapa kesempatan pertemuan antara menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan beberapa kepala daerah, agenda utama yang dibahas

adalah percepatan pembangunan ekonomi di daerah melalui efektivitas dan efisiensi penganggaran. Beberapa isu yang dibahas antara lain persoalan reformasi struktural di sektor riil dan keuangan demi peningkatan daya saing dan iklim investasi di daerah, pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur serta fasilitas pembiayaannya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP). Kedaulatan pangan dan energi serta modernisasi sektor pertanian juga menjadi

Pemerintah pusat mendesain pemekaran sebagai sebagai alat untuk memutus mata rantai birokrasi dalam pelayanan publik demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepada masyarakat.

Dalam kesimpulannya, daerah dihimbau untuk lebih transparan, akuntabel, dan memprioritaskan alokasi anggaran daerahnya untuk kegiatan yang bersifat investasi dan pelayanan publik. Prioritas ini penting jika dibandingkan dengan alokasi belanja konsumtif semata. Di lain sisi, pemerintah pusat diwajibkan untuk turut serta mempersiapkan sisi kelembagaan finansial serta dukungan pembiayaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Penguatan penganggaran di daerah ini sebetulnya sudah dijalankan sejak APBNP 2015. Kenaikan *fiscal space* setelah reformasi kebijakan subsidi dijalankan, betul-betul dimanfaatkan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah. Hasil kesepakatan APBNP 2015 misalnya, salah satunya adalah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp23 triliun, yaitu dari Rp35,8 triliun menjadi Rp58,8 triliun. Alokasi Dana Desa juga melejit secara signifikan dari pagu awal Rp9,1 triliun menjadi Rp20,8 triliun. Kenaikan Dana Alokasi Khusus kemudian difokuskan untuk Program Pendukung Prioritas Kabinet Kerja (P3K2), yang terdiri atas infrastruktur irigasi sebesar Rp9,3 triliun, sektor pertanian Rp4 triliun, pembangunan jalan sebesar Rp4,9 triliun, pengembangan pasar rakyat Rp256 miliar, dan program rujukan BPJS sebesar Rp1,45 triliun. Sementara Dana Desa diarahkan bagi penguatan infrastruktur dasar di desa.

Ketika pendanaan pemerintah sudah begitu melimpah, hal *urgent* yang perlu dijalankan tentu adalah meningkatkan kapasitas daerah dan desa untuk dapat memanfaatkan

pendanaan dengan sebaik-baiknya. Ketika pengalokasian Tranfes ke Daerah dan Dana Desa dapat dijalankan dengan mekanisme sebaik-baiknya, maka dampak positif yang dihasilkan adalah dukungan bagi percepatan pembangunan ekonomi di daerah dalam mengatasi persoalan kesenjangan

antarwilayah serta antara desa dan kota. Inilah persoalan yang wajib dicermati, khususnya tujuan percepatan pembangunan daerah dan desa karena menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita.

Dari kaca mata penulis sendiri, untuk menciptakan transmisi yang efektif antara pendanaan pemerintah dan pembangunan ekonomi di daerah, kata kunci yang perlu diubah adalah menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memahami pelaksanaan desentralisasi fiskal. Awalnya desentralisasi diagendakan bersifat bersifat *a-simetris* dengan tetap mengakui adanya kemajemukan daerah-daerah di Indonesia. Kemajemukan tersebut justru dianggap warna tersendiri dalam potret kebhinekaan dan pemerintah menghargai keberagaman tersebut dengan tetap menghormati keistimewaan, tradisi, dan asal usul terbentuknya beberapa wilayah tertentu seperti Yogyakarta, Aceh, dan Papua. Sayangnya konsep desentralisasi *a-simetris* ini justru justru berubah menjadi konsep *a-simetris desentralisasi* dimana pemerintah pusat memandang otonomi sebagai sistem yang mampu menciptakan kemandirian daerah. Di sisi lain, daerah memandang otonomi sebagai mekanisme potong kompas (*short-cut*) demi mendapatkan alokasi anggaran mandiri.

Pemekaran merupakan contoh sederhana terjadinya kondisi ini. Pemerintah pusat mendesain pemekaran sebagai sebagai alat untuk memutus mata rantai birokrasi dalam pelayanan publik demi meningkatkan

efisiensi dan efektivitas kepada masyarakat. Sebaliknya pemerintah daerah memandang pemekaran sebagai solusi singkat mendapatkan alokasi anggaran mandiri, lepas dari daerah induknya, serta menciptakan eselonisasi pejabat baru di daerah. Hal yang sama juga bukan tidak mungkin terjadi di level desa nantinya. Terlebih, regulasi tidak mengatur adanya hukuman bagi desa yang tidak menggunakan alokasi dana seperti yang diharapkan. Regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Ancaman hukuman hanya berupa penundaan penyaluran Dana Desa. Itu pun hanya dikaitkan dengan persoalan pelaporan administrasi tanpa evaluasi kualitas penggunaan.

Dengan tanpa mengurangi penghormatan atas kebijakan yang sudah dihasilkan, penguatan anggaran di daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebetulnya sudah menjadi modalitas yang memadai bagi upaya percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah dan desa. Namun, bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, tentu menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka daerah dan desa ke depannya dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat daerah dan desa yang berkualitas tentu menjadi *input* yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang. Untuk itu, mari kita wujudkan seluruh mimpi itu selagi belum terlambat.

*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan
**Pendapat pribadi tidak mencerminkan institusi

TREASURY DEALING ROOM

"Penguatan Posisi Likuiditas Kas Pemerintah"

Pengelolaan kas Negara dihadapkan pada permasalahan kelebihan saldo kas atau kekurangan saldo kas. Sehingga perlu untuk membangun satu unit khusus yang tersentralisasi (Centralized Treasury Management) yang bertugas mengelola kelebihan dan kekurangan kas. Pelaksanaan pengelolaan kelebihan atau kekurangan dilaksanakan secara terpusat oleh Treasury Dealing Room di pasar uang. Transaksi yang dilaksanakan oleh TDR seluruhnya bertujuan untuk penguatan posisi likuiditas kas Pemerintah.



EMPAT PILAR PRIORITAS :

1. LIKUIDITAS TERJAGA
2. MINIMALISASI RESIKO DAN BIAYA
3. TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
4. OPTIMALISASI RETURN (PNBP)



**TREASURY
DEALING ROOM**

Gedung Priyadi Praptosuhardjo II, Lt. II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat
email : tdr@depkeu.go.id



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
Website : djpbn.kemenkeu.go.id



Bagi Rorie Asyari, belajar di luar negeri menjadi keharusan. Saat ditemui Media Keuangan, Kamis (22/10) lalu, Presenter Berita Metro TV itu baru kembali tinggal di Jakarta selama tiga minggu setelah menyelesaikan program master di Inggris. Di University of Sheffield, Rorie belajar komunikasi politik internasional dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Rorie dan Bidang Komunikasi yang Dicintainya

Dalam pandangan Rorie, belajar di luar negeri dapat memperluas sudut pandang, menambah pengalaman, dan membuat seseorang memiliki mentalitas yang berbeda. “Kita jadi tahu bagaimana cara pandang orang-orang di sana terhadap berbagai isu, misalnya HAM, LGBT, dan kesetaraan gender,” ujar pria kelahiran Surakarta, 12 Mei 1987 itu. Yang tak kalah penting, belajar di luar negeri membuka kesempatan untuk mengukur kemampuan diri, menambah *networking*, serta memperdalam kemampuan bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan yang kelak menjadi keahlian seseorang.

Rorie memilih University of Sheffield

karena universitas tersebut adalah salah satu yang terbaik di Inggris. Jurusan *Journalism and Communications Politic* di kampus itu juga berada di peringkat kedua di sana. Selama setahun, Rorie banyak belajar komunikasi politik di berbagai negara di Eropa, seperti Inggris, Italia, dan Belgia. “Misalnya bagaimana mereka menjual figur politik, mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik, dan bagaimana kedekatan politik dan media,” ujar mantan penyiar Radio Prambors Solo itu.

Contoh kasus yang dipelajari Rorie adalah bagaimana profesi konsultan politik dan kehumasan yang kerap disebut sebagai *spin doctor*

di Inggris telah berkembang sejak tahun 1990. Sementara di Indonesia, peran *spin doctor* baru berkembang beberapa tahun terakhir dan belum banyak digeluti. Rorie juga mencontohkan keterikatan politik dan media yang memiliki kemiripan dengan kondisi di Indonesia. "Di Inggris, politik dan media sudah jadi satu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh politisi sekaligus pemilik media Robert Murdoch. Fenomenanya sama dengan yang ada di Indonesia," kata dia.

Tak menyerah

Sebelum berangkat ke Inggris dengan sponsor LPDP, Rorie pernah mengalami kegagalan pada saat mendaftar beasiswa lain. Padahal saat itu dia sudah mempersiapkan diri selama 1,5 tahun. "Waktu itu saya benar-benar kesal. Saya sempat merasa dianggap sepele," kata Rorie yang memulai karier sebagai penyiar televisi di stasiun lokal bernama TATV di Solo.

Namun, kegagalan tak menyurutkan langkah Rorie. Dia kemudian mencoba mendaftar pada program beasiswa lain. Pada program beasiswa kedua, dia sudah terpilih sebagai *shortlisted candidates* dan menjadi perwakilan kandidat Indonesia untuk menjalani seleksi di Amerika Serikat. Namun, Rorie urung melanjutkan prosesnya karena baru bisa berangkat pada 2016. "Saat itu saya sudah ingin sekali sekolah," ujarnya.

Pilihan kemudian jatuh pada LPDP. Rorie memiliki alasan tersendiri mengapa bangga bisa terpilih sebagai penerima beasiswa itu. Pertama, LPDP merupakan beasiswa negeri sendiri. "Kemudian, saya juga tidak pernah mendengar cerita ada penerima beasiswanya yang mengalami masalah finansial saat menempuh studi," kata Rorie. Alasan ketiga, dia ingin menjadi bagian dari euforia perubahan yang positif bersama generasi muda yang juga menerima beasiswa itu.

Tantangan

Belajar di negeri yang jauh bukanlah tanpa masalah. Logat penduduk setempat dan perbedaan sistem pengajaran serta budaya lokal menjadi tantangan selama di sana. Namun sebagai mahasiswa Indonesia, Rorie

merasa bangga. Menurutnya, secara akademis mahasiswa Indonesia sangat bisa bersaing dengan mahasiswa dari negara-negara lain. Pada program yang dijalaninya, Rorie belajar bersama 25 mahasiswa dari berbagai negara seperti Inggris, Tiongkok, Taiwan, Ghana, dan Malaysia. Rorie adalah satu-satunya warga negara Indonesia dalam program itu.

Selama menempuh studi, Rorie menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Tugas kuliah yang sangat banyak membuatnya sering berada di sana dari pagi hingga pagi lagi. Membaca berbagai buku dan jurnal, membuat catatan tesis, dan menulis *paper* adalah makanan sehari-harinya. Tugas menulis *academic writing* dipandang Rorie sangat menantang. "Kita di Indonesia tidak dibiasakan untuk menulis itu *kan*," ujarnya.

Rorie mengaku benar-benar fokus pada studinya. Baginya, kesempatan belajar di Inggris adalah *life changing experience* dan titik balik dalam kehidupan. "Saya benar-benar mendapatkan pembelajaran baru, merasa tertampar dalam beberapa aspek, sekaligus merasa bukan siapa-siapa dan belum jadi apa-apa di sana," kata pria yang memiliki hobi berolah raga itu.

Ada dua dosen favorit Rorie di University of Sheffield. Yang pertama bernama Martin Conboy, dosen yang mengajar mata kuliah *History of British Press and Television*. "Materi kuliah sebenarnya agak membosankan, tapi cara mengajar beliau sangat enak. Martin juga adalah salah satu tokoh di University of Sheffield," kata Rorie. Selain Martin, Rorie juga mengidolakan Scott Eldridge yang mengampu mata kuliah *Online News and Media*. Alasannya, Scott yang merupakan warga negara Amerika Serikat, adalah dosen muda yang visioner dan sangat efektif dalam berkomunikasi. "Sangat khas *American*," lanjutnya.

Di tengah kesibukan kuliah, Rorie masih sempat melakukan aktivitas lain. Dia pernah menulis opini untuk harian the Jakarta Post dan situs University of Sheffield. Di samping itu, Rorie juga dipercaya menjadi moderator diskusi dalam beberapa forum yang diadakan

oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di sana.

Tahu kebutuhan

Bagi Rorie, kunci untuk berhasil mendapatkan beasiswa adalah tahu apa yang ingin dipelajari dan ke mana harus belajar. "Jadi pergi ke mana pun memang karena tahu itu adalah yang kita butuhkan," katanya. Seperti Rorie, sejak kecil dia memang sudah ingin menjadi wartawan televisi. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, sang ayah sudah membiasakannya menonton siaran berita dan bercerita soal sejarah dan politik.

Kecintaannya pada bidang komunikasi makin bertambah saat menempuh studi di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Solo. "Setelah kembali dari Inggris, saya makin yakin bahwa komunikasi akan menjadi fokus karier saya di masa depan," ujar Rorie. Bahkan, dia memiliki impian untuk mengambil program master lain dalam beberapa tahun mendatang. "Saya ingin belajar *public policy* agar bisa memberikan sumbangsih untuk menjadikan media lebih punya sikap sendiri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya," kata Rorie.

Di luar menjalani profesinya, Rorie saat ini sedang merintis proyek sosial bersama teman-temannya. Proyek tersebut bertujuan luhur untuk membuat derajat generasi muda Papua setara dengan generasi muda di Jakarta dan wilayah-wilayah lain. "Entah itu dengan menyekolahkan beberapa siswa Papua ke Jawa, pertukaran pelajar, atau mengadakan *road show* ke perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia," ujar Rorie yang pernah membawakan program *Bincang Pagi* di Metro TV itu.



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

Pajak E-Commerce Dalam Negeri, Sudah Berjalankah?

Oleh Rya Agatha

Internet adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang kebutuhannya semakin sentral. Jumlah penggunaannya dari tahun ke tahun meningkat drastis. Diperkirakan pada tahun 2016 hampir setengah penduduk Indonesia akan saling terhubung dengan internet. Penggunaan internet dalam dunia perdagangan pun tidak dapat dihindarkan. Dengan internet, biaya pemasaran dan penjualan dapat ditekan menjadi lebih rendah.

Seiring meningkatnya penggunaan internet dalam perdagangan, pada tahun 1994 muncul istilah *e-commerce* (perdagangan elektronik) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *website*, atau jaringan komputer lainnya yang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Hasil riset Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai pasar perdagangan secara elektronik Indonesia mencapai Rp94,5 Triliun. Pada 2016 nanti, nilai pasar perdagangan secara elektronik

diprediksi mencapai tiga kali lipat, sekitar Rp295 Triliun atau sekitar 1,4 persen dari nilai perdagangan ritel di Indonesia. Jumlah ini dapat terus meningkat hingga menjadi menjadi 5 persen dari nilai perdagangan ritel seperti yang terjadi di Amerika.

Perpindahan bentuk dari usaha perdagangan biasa menjadi *e-commerce* tidak terelakkan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, sebagian pedagang komputer di Mangga Dua kini telah menutup tokonya dan beralih ke *e-commerce*. Selain itu, *e-commerce* menawarkan ketiadaan biaya perizinan sehingga memulai usaha menjadi lebih ringan.

Terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 62 tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce menegaskan bahwa setiap transaksi *e-commerce* tetap dikenakan pajak. Tidak ada perbedaan perlakuan dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya. Dengan landasan yang ada, langkah baiknya apabila dibarengi dengan pelaksanaan dan pemantauan pajak secara teknis yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelaksanaan pajak transaksi *e-commerce* masih dihadapkan pada beberapa masalah, misalnya sulit mendapatkan lokasi Wajib Pajak

(WP). Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi DJP untuk mendapatkan data WP yang melakukan usaha secara *e-commerce*, seperti data dari pihak ekspedisi pengiriman barang hingga data WP pada bank. Ditambah lagi, data VeriTrans dan DailySocial pada artikel *e-commerce* in Indonesia tahun 2012 menyebutkan bahwa perdagangan *e-commerce* di Indonesia hampir setengahnya dikuasai oleh perdagangan *online* via media sosial atau situs penyedia tempat berjualan *online* seperti Kaskus.

Masalah ketidakadilan timbul akibat terganjalnya pelaksanaan pengenaan dan pemantauan pajak *e-commerce*. Jika seseorang membuka toko di pasar dengan omzet Rp20 Juta per bulan, maka diharuskan membayar pajak final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 200 ribu perbulan. Sementara, apabila ia berdagang dengan model *e-commerce*, akan sulit untuk dipantau dan dikenakan pajak kecuali atas kesadaran pribadi.

Akan sangat bijaksana apabila DJP segera mengatasi ketidakadilan ini. Apalagi, masalah ini berawal dari kurangnya tata cara teknis pengenaan dan pemantauan pajak terhadap *e-commerce*. Berangkat dari hal ini, saya mencoba menyampaikan masukan

agar masalah teknis pengenaan dan pemantauan kepatuhan pajak para pelaku usaha *e-commerce* khususnya *online shop* dapat diatasi.

Permasalahan

Pertama, belum adanya satu unit di DJP khususnya di bawah Direktorat Ekstensifikasi yang memantau kepatuhan dan pengenaan pajak bisnis di bidang *e-commerce* atau perdagangan via *online* khususnya *online shop*.

Kedua, sistem poin kinerja bagi *Account Representative* (AR) serta ekstensifikasi hanya berpatok pada WP yang terdapat pada wilayah kerja terkait saja. Akibatnya, penggalan potensi kegiatan dagang *e-commerce* tidak efektif dan tidak berjalan. Contohnya, apabila seorang pegawai ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo menemukan sebuah *website online shop*. Untuk menggali potensinya, pegawai tersebut kemudian melakukan penelusuran data dan menemukan bahwa bisnis *online shop* tersebut terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Kosambi. Kegiatan ekstensifikasi akhirnya tidak dilakukan karena usaha *online shop* tersebut tidak termasuk di wilayah kerja KPP Pratama Pasar Rebo.

Ketiga, DJP mengalami kesulitan meminta data pihak ketiga untuk mendeteksi perdagangan *e-commerce*. Misalnya saja data bank, internet, maupun pengiriman ekspedisi barang. Nufansa Wira Sakti, Ketua Tim Change Management I, *Central Transformation Office* (CTO), Kementerian Keuangan, pada majalah *Inside Tax* Edisi 25 mengatakan bahwa bahwa DJP sudah berupaya meminta data kepada Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk menelusuri pengiriman barang yang dilakukan oleh *e-commerce*. Namun pihak Asperindo tidak bersedia memberikan data tersebut dengan alasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila kita menengok Amerika, *Internal Revenue Service* (IRS)



diberikan kesempatan lebih besar dalam mengelola potensi pajak dengan keleluasaan mengakses data Bank maupun informasi pribadi para Wajib Pajak. Hal tersebut tergambar dalam "Form 8300: Reporting Cash Payment Over \$1,000", dimana setiap transaksi yang bernilai di atas \$1.000 lewat bank wajib diberitahukan kepada IRS dalam jangka waktu 15 hari setelah transaksi terjadi. Dengan begitu, IRS dapat memantau perkembangan transaksi di dalam rekening setiap WP.

Saran

Sebaiknya DJP membentuk satu unit kerja dibawah Direktorat Ekstensifikasi yang berisikan dua hingga orang untuk memantau transaksi perdagangan *online* khususnya jenis *online shop*. Unit kerja tersebut bekerja mengumpulkan informasi yang terkait dengan usaha *online* tersebut dan mengecek validitas data.

Setelah data yang ada dipastikan keabsahannya, unit tersebut dapat memetakan pihak yang memiliki usaha *online* tertentu ke dalam wilayah kerja KPP terkait. Data yang ada dapat segera dikirimkan kepada KPP tersebut sehingga petugas ekstensifikasi yang bersangkutan dapat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau *Account Representative* melakukan pembinaan.

Pemantauan dan pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, mengecek *Internet Protocol* (IP) dari *website online shop* tersebut, untuk melihat pemilik *website* dengan IP tersebut. Bisa juga dengan berlaku sebagai pembeli dengan menanyakan nomor rekening penjual sehingga dapat diketahui nama pemilik *online shop* tersebut.

*Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak

Penerbitan Obligasi Daerah Dipermudah

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas proses penerbitan obligasi daerah, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan tahapan proses penerbitan obligasi daerah. Revisi aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas PMK No.111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah tanggal 25 September 2015.

Aturan ini bisa menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan merilis obligasi daerah karena adanya pemangkasan sejumlah persyaratan. Salah satunya berupa penghapusan ketentuan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik pasca Pemda menerbitkan obligasi. Regulasi ini juga mengatur kepastian waktu proses persetujuan atau penolakan penerbitan obligasi, kewajiban adanya unit pengelola obligasi daerah, dan perubahan kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) dalam penerbitan obligasi daerah.

Pangkas Aturan dan Kepastian Waktu

Untuk mempercepat proses penerbitan obligasi, Pemerintah memangkas aturan persyaratan penerbitan obligasi dan memberikan kepastian waktu perizinan. Persyaratan yang dipangkas yaitu ditiadaknya kewajiban laporan penilaian studi

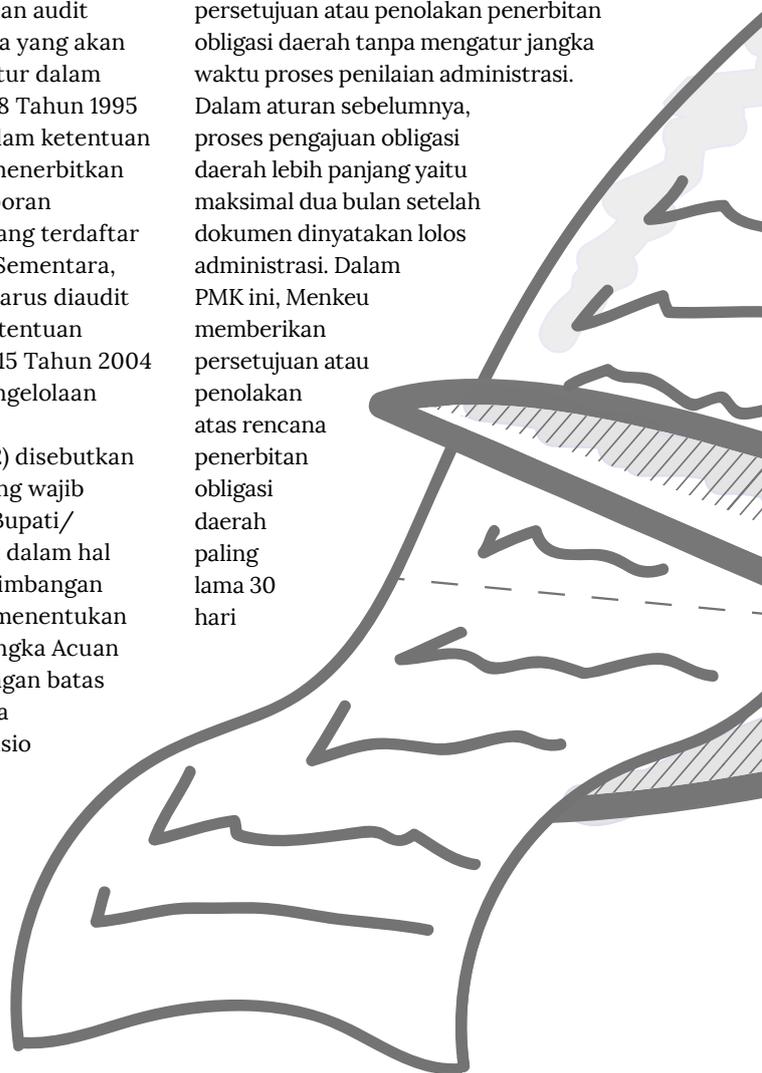
kelayakan oleh penilai yang terdaftar di pihak otoritas di bidang pasar modal.

Dalam aturan sebelumnya, laporan keuangan Pemda diaudit oleh dua instansi yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketentuan audit oleh KAP terhadap Pemda yang akan menerbitkan obligasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam ketentuan tersebut, institusi yang menerbitkan obligasi harus diaudit laporan keuangannya oleh KAP yang terdaftar di otoritas pasar modal. Sementara, pengelola APBD Pemda harus diaudit oleh BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan sejumlah persyaratan yang wajib disampaikan Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menkeu dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemda wajib menentukan kegiatan, membuat Kerangka Acuan Kerja, membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman, serta membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Disamping itu,

Pemda juga diharuskan mengajukan persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan menyiapkan unit pengelola obligasi daerah.

Selain memangkas persyaratan, PMK ini memberikan kepastian waktu persetujuan atau penolakan penerbitan obligasi daerah tanpa mengatur jangka waktu proses penilaian administrasi. Dalam aturan sebelumnya, proses pengajuan obligasi daerah lebih panjang yaitu maksimal dua bulan setelah dokumen dinyatakan lolos administrasi. Dalam PMK ini, Menkeu memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah paling lama 30 hari



kerja setelah dokumen rencana penerbitan obligasi daerah memenuhi penilaian administrasi.

Unit Khusus Obligasi Daerah

Meskipun terdapat pelanggaran aturan terkait persyaratan dan waktu, Menkeu tetap mensyaratkan Pemda untuk menjaga prinsip *governance* dan konservatif dalam penerbitan obligasi daerah. Semakin rigid-nya persyaratan yang diberikan bertujuan untuk menghindari risiko tidak berhasil atau default-nya obligasi daerah pasca diterbitkan. Aturan konservatif

tersebut tercermin dalam salah satu persyaratan yang harus dimiliki daerah sebelum menerbitkan obligasi, yaitu adanya unit khusus yang bertugas mengelola obligasi daerah.

Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diatur bahwa unit tersebut harus memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia yang mengelola obligasi daerah. Adanya sumber daya manusia yang mengelola obligasi daerah, diharapkan dapat menjaga *governance* dan memantau perkembangan nilai pasar serta imbal hasil yang berasal dari obligasi daerah.

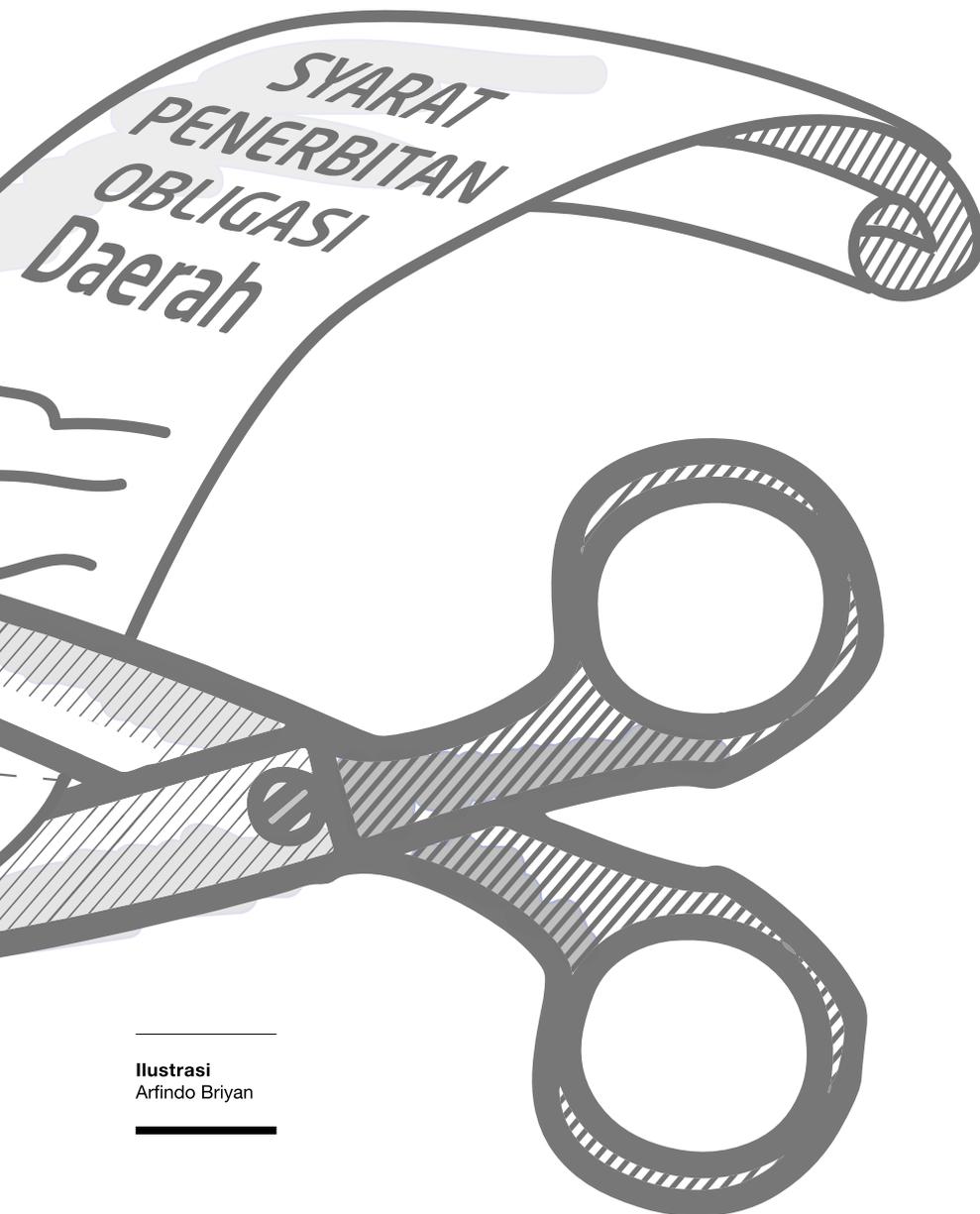
Jangka Waktu Lengkapi Dokumen

Aturan lain yang ditegaskan dalam PMK ini ialah ketentuan Pemda untuk menyampaikan dan melengkapi dokumen secara tepat waktu. Pasal 9A mengatur bahwa Pemerintah akan meminta Pemda untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan paling lama 40 hari kerja. Selanjutnya, jangka waktu yang harus diselesaikan Pemda terkait untuk melengkapinya paling lama 60 hari kerja. Jika tidak, maka Menkeu tidak dapat memproses usulan tersebut.

Apabila persyaratan administrasi telah lengkap, maka Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan penilaian keuangan terhadap jumlah kumulatif pinjaman, DSCR, dan jumlah defisit APBD sebagaimana yang ditetapkan Menkeu. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menkeu memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah.

Penutup

Sesuai materi yang diatur dalam PMK Nomor 180/PMK.07/2015, pengaturan lebih fokus pada kewenangan Menkeu. Setelah Menkeu memberikan persetujuan, proses penerbitan obligasi daerah selanjutnya berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi antar otoritas (Kementerian Keuangan, BPK, OJK, dan Kementerian Dalam Negeri) semakin mempermudah Pemda untuk dapat menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur. Bagi Pemda, pekerjaan selanjutnya ialah mempromosikan penerbitan obligasi kepada masyarakat untuk membentuk awarness dan memberikan edukasi yang tepat tentang obligasi daerah.



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Budi Sulistyó

Suara Bariton Sulthon yang Memukau



“Suatu ketika suaramu akan jadi duit”. Kalimat itu selalu terngiang di benak Sulthon Junaidhi setiap kali mendapat tawaran menjadi master of ceremony (MC). Ia percaya, perkataan orang tua memang mengandung doa.

Sulthon Junaidhi.

Foto
Arfindo Briyan

Sulthon lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kota yang terkenal dengan julukan Kota Pisang, Lumajang. Ayahnya adalah seorang aktivitis di organisasi pemuda, organisasi Islam, dan organisasi olahraga. Sang ibu juga tak kalah sibuk dengan keikutsertaannya secara aktif di organisasi Islam Al Hidayah di Lumajang. Masa kecil Sulthon kental dengan aktif mengikuti kedua orang tuanya hadir dalam berbagai acara. Tak heran bila rumahnya ramai orang layaknya posko organisasi. “Mungkin karena faktor lingkungan itu lah yang mempengaruhi saya menjadi senang berinteraksi dengan orang lain dan aktif

berkegiatan,” jelas lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1991.

MC sebagai hobi

Semasa duduk di bangku sekolah, Sulthon dikenal sebagai siswa yang senang berorganisasi. Pembawaannya yang supel dan percaya diri itu lah yg membuatnya selalu terpilih menjadi ketua kelas berturut-turut sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). “Saya juga bingung kenapa selalu ditunjuk menjadi ketua kelas. Sekalinya tidak dipilih sebagai ketua hanya saat kelas 3 SD. Padahal saya tidak pernah mengajukan diri. Saya sudah duduk

diam di sudut kelas pun tiba-tiba dipilih jadi ketua,” ujarnya sembari tertawa. Bahkan saat di bangku SMP dan SMA ia didaulat menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Begitu pula saat menjadi mahasiswa, ia dipilih menjadi ketua angkatan dan ketua jurusan. Jiwa kepemimpinan seakan terus melekat dalam diri Sulthon.

Menjadi mahasiswa yang aktif berkegiatan membuat pria kelahiran 29 Juli 1968 ini sering didaulat sebagai MC acara kampus. Selepas lulus dari STAN, Sulthon mendapat penempatan tugas pertama di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan. Setelah menjadi pegawai Kementerian Keuangan, ia semakin aktif diminta membawakan berbagai acara di kantor. Mulai dari level KPKN hingga level Kantor Wilayah dan Provinsi. Menjadi pegawai yang diminta memandu acara tingkat provinsi tentu membuat Sulthon bangga. Sementara di kantor tersebut juga ada para MC yang sudah senior. Banyak orang tanpa diminta selalu menyebutkan daya tarik yang dimiliki Sulthon, “Suara baritonmu itu yang menghipnotis,” tuturnya menirukan komentar orang lain.

Setelah lima belas bulan bertugas di Medan, ia ditempatkan di KPKN Jember selama tujuh tahun. Selama di Jember, Sulthon semakin sering dipercaya sebagai MC. Di Jember, Sulthon bertemu dengan wanita yang kini menjadi istrinya. Bagaimana jodoh yang sudah diatur Tuhan, latar belakang istri Sulthon tak jauh-jauh dari dunia seni. “Istri saya seorang musisi sekaligus *keyboardist*, bahkan dikaruniai suara merdu. Jadi kita sepaket kalau ‘ngamen’. Saya jadi MC, istri saya bermain *keyboard* sambil menyanyi,” tutur pria yang juga sering menjadi MC *event* internasional tersebut.

Tiket emas ke Jakarta

Ada kisah menarik ihwal penempatan Sulthon di Jakarta. Setelah bertugas di Jember, ia diamanahkan untuk mengabdikan di Balikpapan selama empat tahun. Pada saat itu Balikpapan menjadi tuan rumah acara Reuni Alumni STAN yang dihadiri beberapa pimpinan unit eselon I. Sulthon pun didaulat untuk membawakan acara bergengsi itu.

Saat acara, salah satu direktur jenderal bertanya kepada panitia “Siapa itu MC-nya? Dari *broadcast* (stasiun televisi) mana?” “Pegawai sini Pak,” jawab panitia. Sang direktur jenderal tersebut pun tercengang. Tak disangka, tiga minggu kemudian Sulthon mendapat ‘tiket emas’, sebuah Surat Keputusan pemindahannya dari Banjarmasin ke Jakarta.

Pesan almarhum ayah

Dalam setiap rezeki yang diterima Sulthon dari hasil menjadi MC, ia selalu teringat perkataan almarhum ayahnya. Saat masih di bangku SMP, Sulthon bersama teman-teman sebayanya hobi siaran melalui radio amatir. Saat itu yang populer adalah komunikasi melalui Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), istilah anak muda saat itu adalah *nge-break*. Saat Sulthon sedang *nge-break* itulah ayahnya juga memantau secara *live*. “Le (panggilan untuk anak laki-laki), suatu ketika suaramu akan jadi duit,” tutur Sulthon menirukan suara almarhum ayahnya kala itu.

Sulthon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah dan



Setiap diri kita pasti ada nilai unggul. Kontribusikanlah itu. Jangan pelit-pelit berbagi ilmu. —Sulthon

Festival
Teluk Jailolo.

Foto
Dok. Pribadi

Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menganggap bahwa menjadi MC adalah panggilan jiwa. Ia tidak menganggap kepiawaiannya sebagai MC adalah profesi, melainkan sebuah hobi. “MC adalah *event organizer* kecil. Tugas MC menghubungkan semua rangkaian acara. MC yang memberikan komando agar seluruh acara berjalan sukses,” kata pemegang sabuk hitam karate yang telah mewakili Jawa Timur dalam Kejuaraan Nasional tahun 1987 itu.

Saat MC diuji

Dari ratusan acara di lingkungan Kementerian Keuangan, ada satu acara yang paling berkesan bagi Sulthon. Penggemar penyiar acara olahraga era 1970-an Olan Sitompul ini menceritakan, pada suatu acara dimana seluruh direktur jenderal dan pejabat lainnya sudah hadir, mendadak iringan musik mati karena kesalahan teknis. Padahal saat itu acara inti sudah selesai, tinggal menunggu acara hiburan. Saat itulah kreativitas seorang MC diuji.

Akhirnya Sulthon mencairkan suasana dengan melibatkan para undangan, “Ok hadirin, acara harus tetap berlanjut. Kita menyanyi diiringi gitar sudah biasa, kita menyanyi diiringi *band* sudah wajar, sekarang bagaimana kalau menyanyi tanpa alat musik sama sekali? Siapa yang berani?” Tak dinyana, beberapa pejabat berebutan bernyanyi dangdut di atas panggung. Acara kembali meriah diiringi tepuk tangan para undangan. Sirna sudah ketegangan acara karena kesalahan teknis, semua berkat ide brilian Sulthon.

Masih banyak yang ingin dilakukan Sulthon ke depan. “Saya ingin lebih banyak *sharing*,” akunya. Selama ini Sulthon telah beberapa kali diminta menjadi narasumber pelatihan keprotokoleraan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia merasa ingin lebih banyak berkontribusi bagi orang lain. “Setiap diri kita pasti ada nilai unggul. Kontribusikanlah itu. Jangan pelit-pelit berbagi ilmu,” tuturnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Saatnya Mulai Membaca dan Menulis



Ilustrasi
pixabay.com

Hobi yang seringkali ada dalam biodata siswa/siswi sekolah barangkali adalah membaca. Membaca adalah suatu kewajiban bagi siswa/siswi. Mereka menambah bacaannya sesuai dengan minatnya. Ketika sudah menjadi pegawai, barangkali minat baca itu sudah sirna karena terlalu lelah dengan pekerjaan di kantor. Lelah dengan pekerjaan teknis dan administrasi, kecuali bagi perumus kebijakan atau analis yang diharuskan banyak membaca dan menulis.

Jika kita merenungkan apakah membaca itu kontra produktif dengan pekerjaan maka jawabannya malah justru kebalikannya. Membaca buku-buku yang mendukung pekerjaan kita dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi tempat kerja membuat seorang pegawai dapat berpikir lebih luas dan bijaksana. Pendapatnya akan lebih tajam dan solusinya lebih bermutu

karena didukung oleh pengetahuan. Pengetahuan berbanding lurus dengan kinerja seorang pegawai.

Jika kita renungkan lagi, betapa banyak tokoh besar yang gemar membaca. Bahkan Firaun sekalipun memiliki koleksi buku sebanyak 20.000 di perpustakaan pribadinya. Presiden RI Pertama Ir. Soekarno memiliki banyak buku untuk dibaca sehingga saat menyampaikan pendapat membuat rakyat Indonesia berbondong-bondong mendengar pidatonya. Buku adalah sebab seseorang menjadi orang besar.

Cukupkah dengan membaca? Jawabannya tentu saja tidak. Mari kembali merenungkan nasehat Pramoedya Ananta Toer, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah." Senada pula dengan ungkapan Helvy Tiana Rosa, "Peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari berapa banyak orang yang membaca

dan menulis di negeri itu." Membaca akan lebih memiliki manfaat untuk orang lain bila kita menuangkannya melalui tulisan. Tak banyak yang tahu, menulis memiliki banyak keuntungan.

Jika banyak orang yang tahu bahwa menulis dapat meredakan stress, banyak orang akan berbondong-bondong menulis. Menulis dapat mengikat ilmu, lebih mempertahankan pengetahuan yang ia dapatkan dari membaca, mendengarkan ceramah ilmiah, atau mengamati fenomena. Menulis dapat membuat seseorang damai dan kadang kali salah satu metode rehat yang paling produktif adalah menulis. Menulis dapat memperluas pergaulan dan bahkan membuat seseorang menambah penghasilannya dari royalti tulisan.

Saya mendengar cerita tentang seseorang yang hampir lima kali gagal dalam memperoleh beasiswa. Wajahnya ketar-ketir sebelum wawancara. Akan tetapi saat wawancara dia terkejut. Pewawancara berkata, "selamat Pak, anda kami terima, buku yang Anda terbitkan dari penerbit sebuah penerbit *indie* sudah masuk katalog perpustakaan universitas kami. Ternyata tulisan Anda bagus dan salah satu profesor kami menyukai tulisan tersebut. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Beliau suka gagasan Anda." Betapa berkah menulis dapat membuat seseorang memperoleh beasiswa. Itu hanya salah satunya saja.

Kata siapa menulis itu susah? Barangkali tidak ada satu pun pegawai sekarang yang tidak mengenal telepon genggam atau gadget canggih. Para pegawai seringkali menulis *short message service* (SMS), *chatting* dengan Whatsapp, LINE, membuat status facebook, menulis *e-mail*, dsb. Betapa banyak kata yang sudah diketik, tapi kenapa tidak satu pun menjadi sebuah artikel dan bahkan buku yang dapat mencerahkan banyak orang atau memberi pengetahuan yang berharga kepada banyak orang.

Teks Siko Dian Sigit

Uji Nyali di Ketinggian

Judul:
The Walk

Genre:
Drama, Biografi,
Adventure

Sutradara:
Robert Zemeckis

Pemain:
Joseph Gordon Levitt,
James Badge Dale,
Ben Kingsley, Charlotte
Le Bon, Ben Schwartz,
Clement Sibony, dan
Steve Valentine.

Produksi:
Sony Pictures
Entertainment

Durasi: 123 Menit

Banyak film yang diangkat dari kisah nyata mencapai kesuksesan karena mampu menginspirasi penonton. Ada pula beberapa tema film yang beralur mudah ditebak, seperti tema cinta, keluarga, dan perjuangan hidup. Kali ini sutradara Robert Zemeckis membuktikan bahwa *The Walk* yang diangkat dari kisah nyata memiliki alur yang mampu mengguncang emosi penonton. Sutradara asal Amerika Serikat ini berhasil mempertahankan karakter Philippe Petit (Joseph Gordon Levitt) sebagai seorang seniman *high walk* yang juga terlibat dalam proses penulisan naskah.

Film ini diangkat dari kisah nyata seorang seniman *high walk* asal Perancis Philippe Petit yang melakukan atraksi berjalan di antara menara gedung kembar World Trade Center (WTC) di New York hanya dengan menggunakan seutas kabel dan batang besi penyeimbang. Sebuah mimpi yang telah lama ia rencanakan untuk bisa menaklukkan gedung tertinggi di Amerika Serikat, bahkan di dunia setinggi 417 m di tahun 1974. Rencana tersebut banyak dibantu oleh Rudy Omankowsky (Ben Kingsley) sebagai pemimpin sirkus tempat Philippe belajar tentang *high walk*.

Dalam perjalannya Philippe bertemu dengan Annie (Charlotte Le Bon) dan Jean Louis (Clement Sibony) yang menjadi tim untuk pertunjukkan sirkusnya. Sirkus yang mereka hadirkan terbilang nekat hingga menarik para penonton untuk selalu menunggu setiap aksi mereka. Berhasil berjalan di atas menara Notre Dame Paris, membuat Philippe merasa tertantang untuk menaklukkan gedung tertinggi di dunia dan menjadi obsesi yang harus diwujudkan dalam hidupnya yaitu melintas di antara menara gedung kembar WTC New York.

Philippe bersama timnya sempat mengalami kesulitan ketika membawa peralatan yang akan mereka gunakan dari Paris ke New York, karena petugas bandara mengira mereka orang yang patut dicurigai membawa alat-alat yang tidak lumrah untuk penumpang pesawat

biasa. Akan tetapi Philippe dan petugas bandara malahan membuat *gimmick* komedi yang membuat penonton tertawa di dalam percakapannya.

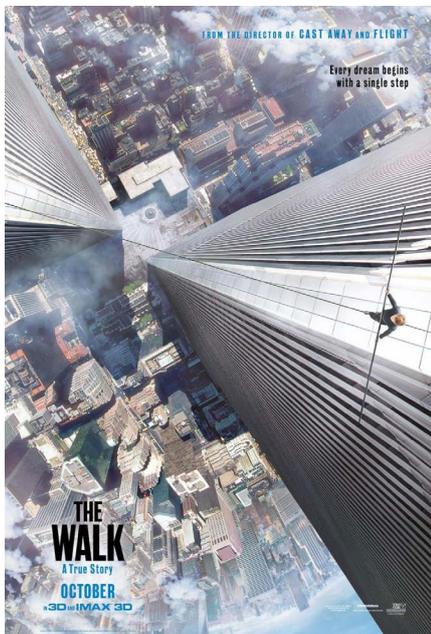
Sesampainya di New York, Philippe terus mengamati secara detail setiap sudut dari menara gedung WTC yang saat itu belum selesai dibangun. Hal ini agar dia dengan mudah menyelip untuk bisa masuk memasang kabel secara diam-diam. Philippe beserta timnya berhasil memasang kabel tersebut sebelum matahari terbit, tepat seperti apa yang dipikirkan oleh mereka sebelumnya.

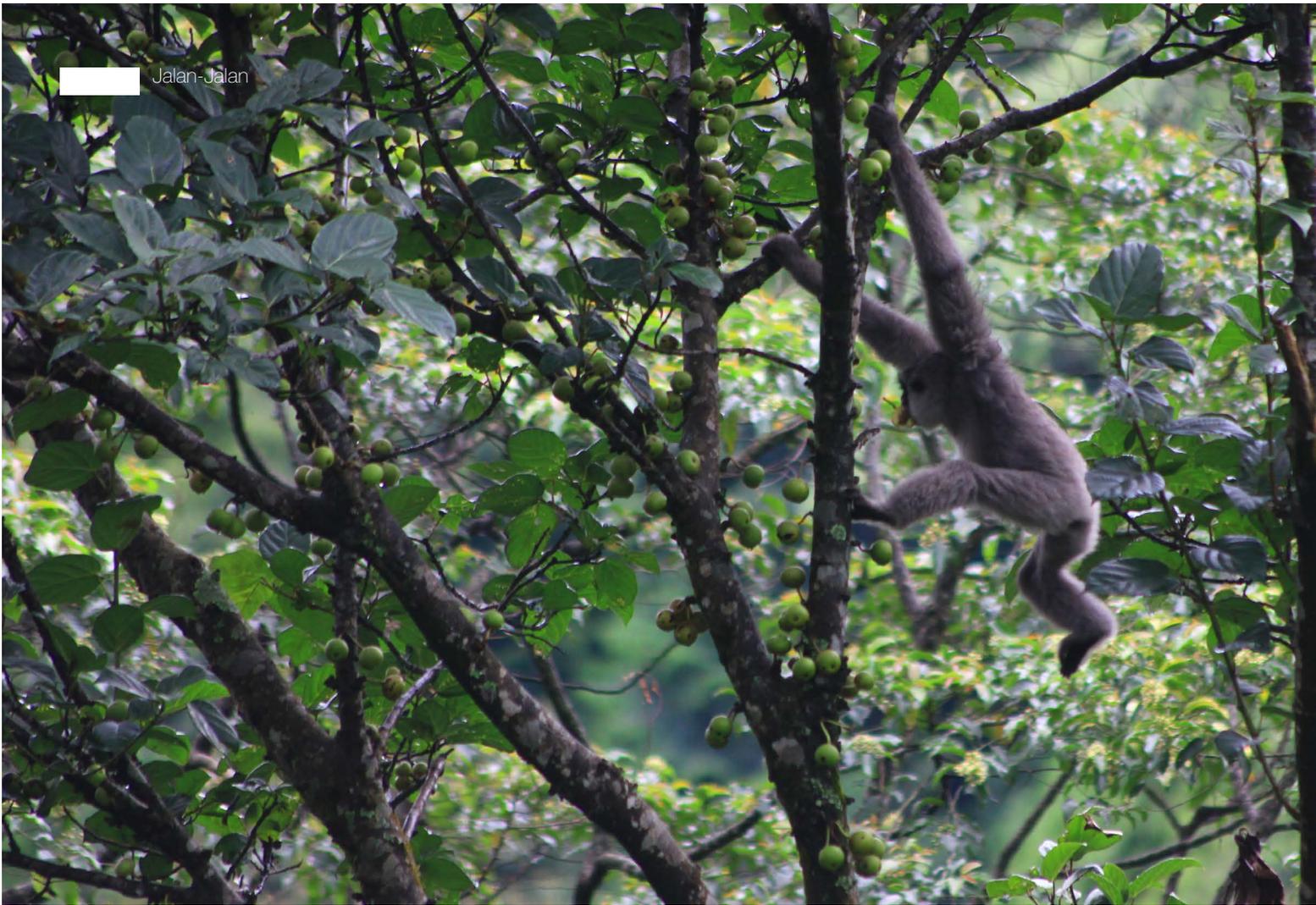
Selama film berlangsung, kental terasa suasana 1970-an, gaya hidup serta fashion berhasil dihadirkan kembali kemasan retro kota New York. *Setting* tempatnya dibuat detail hingga bisa menyamai keadaan pada saat itu, sekeliling area gedung memang belum ada gedung tinggi yang menjulang selain WTC di New York.

Drama berbalut petualangan itu menggambarkan setiap adegan dalam film *The Walk*, walaupun banyak sekali dialog sepanjang film berlangsung. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat kita jenuh dalam menanti *ending* cerita. Dari film ini kita bisa mengetahui bahwa gedung kembar WTC dahulu pernah tidak disukai oleh warga New York, namun berkat aksi nekat Philippe, lambat laun bisa menjadi *icon* yang dicintai dan dibanggakan oleh warganya.

Untuk Anda yang ingin merasakan sensasi berada di ketinggian gedung WTC di New York, anda perlu menyisihkan waktu sejenak untuk menonton film ini. Perlu diketahui, sutradara, produser, dan penulis naskah film ini adalah pemenang Academy Awards dan Golden Globe Award Amerika Serikat untuk film *Forest Gump* pada tahun 1995. *The Walk* hadir dalam format 2D, akan tetapi cobalah Anda mencoba menonton dalam format 3D yang lebih seru dan menegangkan. Selamat menonton, rasakan adrenalin kita tertantang di akhir cerita!

Peresensi Krishna Pandu Pradana





Curug Seribu, Pesona Air Jatuh di Lembah yang Teduh

G unung Bunder di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan kawasan wisata yang menyajikan keindahan alam yang memanjakan nafas dan mata. Jika Anda menyukai air terjun, salah satu lokasi yang wajib dikunjungi di kawasan ini adalah **Curug Seribu**. Berjarak kurang lebih 80 km dari Ibu Kota, jalan menuju Curug Seribu dapat terbilang mudah.

Dengan bekal aplikasi penunjuk arah di telepon selular ber-*platform* android, penunjuk arah di jalan, dan bertanya kepada penduduk sekitar, perjalanan darat menuju lokasi memakan waktu tidak lebih dari dua jam dari kota Bogor. Untuk dapat masuk ke kawasan wisata, setiap pengunjung cukup membayar retribusi masuk sebesar Rp15.000.

Perjalanan menuju Curug Seribu menyajikan pemandangan khas perbukitan. Pohon-pohon hijau dan jalanan berkelok mampu memicu semangat bagi siapa saja yang melewatinya. Jalan yang menghubungkan antara jalan besar dan lokasi parkir yang berbatu-batu membuat perjalanan semakin seru. Hanya butuh waktu sekitar lima belas menit, pengunjung akan sampai di tempat parkir sekaligus pos persinggahan untuk bersiap-siap melakukan *trekking* menjumpai si air jatuh di lembah yang



Alam dari kawasan wisata masih mendukung kehidupan beragam makhluk hidup.

Jalanan berkelok menuju Curug Seribu.

Curug utama terlihat di depan mata.

Foto
Bambang Setyoko

teduh.

Hujan yang dapat datang dan pergi sewaktu-waktu memaksa pengunjung menyiapkan jas hujan agar perjalanan tidak terhenti. Jangan lupa pula, siapkan air minum, sedikit makanan ringan, dan kamera untuk mengabadikan pemandangan. Meski diguyur hujan, jalan setapak dengan susunan batu yang cukup rapi tidak lantas menjadi licin. Hanya saja butuh tenaga ekstra untuk melangkahakan kaki.

“Subhanallah” adalah kata yang sering saya ucapkan di sepanjang perjalanan. Keringat yang mengucur di muka menetes ke dada seolah tidak terasa, dialihkan oleh indahnya pemandangan. Jika memandang jauh, terlihat bukit-bukit kecil biru yang syahdu. Jika memandang dekat, vegetasi khas hujan tropis tidak pernah gagal menyejukkan hati.

Eloknya motif dedaunan pakis menjadi bukti bahwa alam di sini masih sangat mendukung kehidupan makhluk hidup beragam jenis.

Sangat mudah menjumpai sekawanan kera yang sedang mencari makan bergelantungan melompat dari pohon ke pohon. Kicauan burung-burung, suara serangga hutan, desau angin, dan gemuruh air terjun membuat pikiran menjadi damai memasuki keadaan meditasi terdalam. *Subhanallah!*

Sebelum mencapai curug utama, dapat dijumpai beberapa curug kecil di sepanjang perjalanan. Pancuran air jernih yang sengaja dibuat oleh warga dapat dijadikan air minum apabila bekal air minum telah habis. Jangan khawatir apabila terjebak hujan deras di tengah perjalanan. Terdapat sebuah gubug kecil yang mampu menampung delapan sampai

dengan sepuluh orang yang sebagai tempat berteduh.

Berjalan sedikit lagi, curug utama yaitu Curug Seribu dengan ketinggian kurang-lebih seratus meter berdiri dengan gagah di depan mata. Cahaya matahari berkolaborasi dengan butiran-butiran air mempertontonkan gerakan tarian yang indah. *Mantaab!* Tak hentinya tombol *shutter* kamera saya tekan untuk menangkap indah pesonanya.

Curug Seribu bukanlah satu-satunya air terjun di kawasan wisata alam ini. Ada beberapa curug tetangga yang tidak kalah menariknya seperti Curug Ngumpet, Curug Cigamea, dan Curug Cihurang. Semoga dapat mengunjunginya di lain kesempatan.

Teks Bambang Setyoko



Foto
Twitter
@dindakanyaa

Tak Sekedar *Hit and Run*

Berprofesi sebagai publik figur identik dengan jadwal yang padat, begitupun dengan Dinda Kanyadewi, pemain sinetron dan film. Meskipun aktif di dunia hiburan, wanita kelahiran Balikpapan, 5 Februari 1987 ini tengah disibukkan sebagai fasilitator 'Kelas Inspirasi Jakarta'.

Terjunnya anak pasangan Surya Saputra Yudanegara dan Tuti Natadireja di kelas inspirasi berawal dari satu pertanyaan dibenaknya. Aktris yang dikenal lewat karakter antagonis ini memikirkan sejauh mana dampak perannya selama ini bagi masyarakat.

"Pada suatu ketika saya bertemu anak kecil, mungkin umurnya sekitar 4 tahun. (Lalu menyapa) 'Halo, dik', terus dia nangis lihat saya. Dia bilang 'ini tante yang jahat'. Saya jadi merasa bukan *role model* yang baik buat anak-anak," ujar Dinda saat mengisi

diskusi bertajuk 'Yang muda Yang Turun Tangan' yang diselenggarakan Mezzanine Club beberapa waktu lalu.

Berawal dari kejadian itu, perempuan yang belakangan menjadi sutradara film pendek ini mencari-cari wadah dimana dirinya bisa melakukan sesuatu, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Ditengah masa pencarian itu, Dinda bertemu dengan salah seorang rekan yang kemudian memberinya gagasan untuk bergabung dengan gerakan para profesional turun mengajar di sekolah dasar.

Akhirnya tahun 2014, Dinda diterima sebagai inspirator kelas inspirasi. "Ini wadah yang tepat karena disini perkumpulan orang-orang dengan visi misi yang sama, semangat yang sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Mereka penuh dengan harapan besar," ujarnya. Saat itu, Dinda mendapat kepercayaan untuk

berbagi cerita dan pengalaman dengan anak-anak Sekolah Dasar Negeri 01 Tanah Sereal yang berlokasi di belakang kawasan Roxy Mas, Jakarta.

Setelah kelas berakhir, menurut Dinda hal terpenting dari kelas inspirasi ini ialah apa yang akan kita lakukan setelah ini. "Perasaan mengajar itu (bagai) candu buat saya." Untuk itulah, Dinda memutuskan kembali bergabung sebagai fasilitator yang bertugas menjembatani hubungan antara para guru dengan para inspirator.

"Menjadi relawan tidak (sekedar) *hit and run*, sekali mengajar terus sudah, tidak melakukan apapun lagi. Ketika menjadi inspirator (hanya) tau *happy*-nya saja, (sebaliknya) ketika jadi fasilitator (jadi) tau banyak masalah (kondisi) pendidikan kita," tuturnya.

Teks lin Kurniati



Bung Piskal

CERITA: WARDAH GAMBAR: BIMO





MARI
MENGENANG
PAHLAWAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA